

**ANALISIS KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN
UNTUK REKOMENDASI PENGENDALIAN ALIH
FUNGSI KAWASAN PERTANIAN KECAMATAN
BANTIMURUNG, KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh

PUTRI DWI WULANDARY

NIM 45 18 042 022



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

**ANALISIS KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN UNTUK
REKOMENDASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
KAWASAN PERTANIAN KECAMATAN
BANTIMURUNG, KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S1 Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh :

**PUTRI DWI WULANDARY
NIM 45 18 042 022**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN UNTUK REKOMENDASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI KAWASAN PERTANIAN KECAMATAN BANTIMURUNG, KABUPATEN MAROS

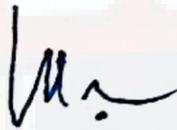
Disusun dan diajukan oleh

PUTRI DWI WULANDARY
NIM. 45 18 042 022

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 19 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing I



Ir. Hj. Rahmawati Rahman, M.Si
NIDN: 09-070468-01

Pembimbing II



Emil Salim Rasyidi, ST.,M.Sc
NIDN: 09-120891-01

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. H. Nasrullah ST., MT
NIDN: 090-80773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. S. Kamran Aksa, ST.MT.
NIDN: 09-110774-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.1039/SK/FT/UNIBOS/VII/2022 Pada Tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022

Skripsi Atas Nama : Putri Dwi Wulandary

Nomor Pokok : 4518042022

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Ir. Hj. Rahmawati Rahman.,Msi

Sekretaris : Emil Salim Rasyidi, ST., M.Sc.

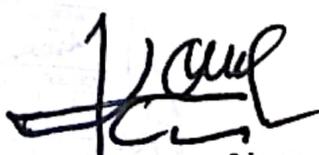
Anggota : 1. Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.

2. Rimba Arief, ST.,M.Eng

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


Dr. H. Nasrullah, ST., MT.
NIDN : 0908077301

KETUA JURUSAN
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN : 0911077401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mahasiswa : Putri Dwi Wulandary

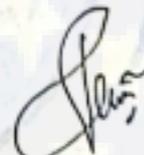
Stambuk : 45 18 042 022

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan penggandaan tulisan atau hasil pikiran orang lain. Bila di kemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Penulis



Putri Dwi Wulandary

ABSTRAK

Putri Dwi Wulandary, 2022 "Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros". Dibimbing oleh Hj. Rahmawati Rahman dan Emil Salim Rasyidi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung, serta memberikan konsep pengendalian alih fungsi lahan Kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan metode meng-*overlay* peta Satuan Kemampuan Lahan, Kemampuan pengembangan lahan, arahan tata ruang pertanian, selanjutnya dianalisis dengan analisis kesesuaian antara tata ruang terhadap arahan pengembangan pertanian. Hasil yang di peroleh pada arahan kesesuaian lahan telah ditemukan bahwa pada Kecamatan Bantimurung terbagi atas dua kelas yaitu tanaman setahun dengan luas 48761,60 Ha, dan tanaman tahunan 1457,77 Ha. Kemudian pada hasil *overlay* arahan kesesuaian lahan dengan pola ruang dan kawasan KP2B ini menghasilkan konsep pengendalian kesesuaian lahan pertanian tanaman setahun ataupun tanaman tahunan dengan peruntukan rencana pola ruang kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, kawasan pertambangan batuan, kawasan industri, kawasan keunikan fosil dan batuan, kawasan pariwisata, budidaya perikanan, dan tanaman nasional yang berstatus Non KP2B diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun untuk kesesuaian lahan pertanian dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status KP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada kawasan ini, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 dan untuk kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan diarahkan untuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan.

Kata Kunci : Kawasan Pertanian, Kesesuaian Lahan, Pengendalian, Ahli Fungsi Kawasan Pertanian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros**”, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana teknik.

Penulis menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya halangan yang datang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, namun syukur Alhamdulillah dengan doa, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui. Dalam kesempatan ini pula tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya dan setulusnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, salam sayang dan hormat dari Ananda yang selalu tersembahkan kepada Ayahanda **H. Haris** dan Ibunda **Hadra Habe** yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan nasehat, motivasi, materil maupun dukungan moril serta doa restu

sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

2. Saudara tercinta **Hardy Gunawan** yang sangat penulis sayangi serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak **Prof.Dr.Ir.Batara Surya, S.T.,M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr.Ir.H.Nasrullah.ST.,MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak **Dr.S.Kamran Aksa,ST.,MT** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar
6. Ibu **Ir. Rahmawati Rachman M.Si** selaku Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus Pembimbing I yang selama ini membimbing, memberi kritik serta masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak **Emil Salim Rasyidi, S.T.,M.Sc** selaku Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dengan sabar memberikan masukan-masukan sejak awal bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada seluruh Staf dan Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas “Bosowa” Makassar yang telah memberikan wadah dan ilmu selama duduk di bangku perkuliahan sejak awal sampai akhir.

9. Terima Kasih untuk Bibi **Hadriani** dan Adik Sepupu **Anugrah Angraeni** yang telah memberikan tempat serta dukungan selama menempuh pendidikan kuliah di Kota Makassar.
10. Terima kasih untuk **Muh. Khalil Jibrán** atas bantuan, dukungan dan support penuhnya selama ini.
11. Terima Kasih untuk **A. Nur Istiqamah** yang selama ini menemani baik suka maupun duka perjalanan menempuh pendidikan selama kuliah.
12. Terima Kasih kepada saudara **Setiawan Mursida** dan **Andika Saputra Hasanuddin** yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa terkhususnya **PEACE 2018**.
14. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu demi kesempurnaan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak

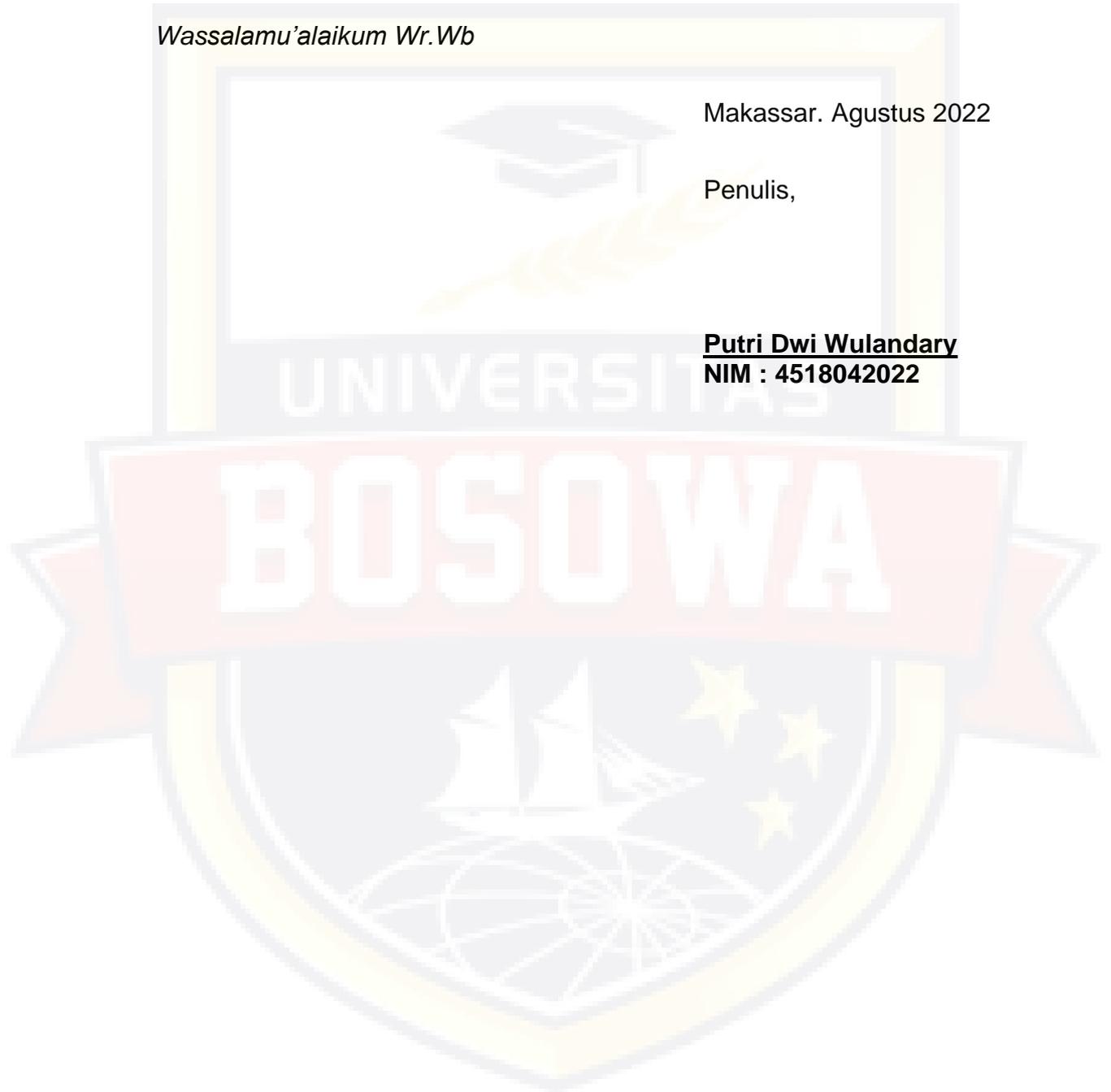
sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar. Agustus 2022

Penulis,

Putri Dwi Wulandary
NIM : 4518042022



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR DIAGRAM	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kawasan.....	7
B. Kawasan Pertanian.....	7
C. Pengertian Lahan	10
D. Kesesuaian Lahan	12
E. Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	13
F. Kemampuan Lahan	17
G. Sistem Informasi Geografis	21
H. Tumpang Susun (<i>overlay</i>)	22
I. Arah Tata Ruang Pertanian	23
J. Penelitian Terdahulu.....	26
K. Kerangka Fikir	37

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	47
F. Definisi Operasional.....	56

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Maros

1. Aspek Fisik Dasar

1) Wilayah Administrasi	59
2) Kemiringan Lereng	62
3) Jenis Tanah.....	64
4) Iklim.....	66
5) Curah Hujan	67
6) Penggunaan Lahan	69

2. Tata Ruang

1) Tujuan, Kebijakan dan Startegi Penataan ruang Wilayah Kabupaten Maros	71
2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Maros...72	
3) Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Maros	75

3. Demografi

1) Jumlah Penduduk	81
2) Kepadatan Penduduk.....	82

B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Administrasi dan Letak Geografis	83
2. Kondisi Fisik Wilayah	
1) Topografi.....	87
2) Morfologi	88

3) Kemiringan Lereng	88
4) Curah Hujan	88
5) Jenis Tanah.....	89
6) Penggunaan Lahan.....	90
3. Demografi	
1) Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	98
2) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	99
4. Pertanian	101
C. Kesesuaian Lahan Pertanian	
1. Analisis Kemampuan Lahan.....	102
2. Kesesuaian Lahan Pertanian.....	121
D. Konsep Pengendalian	
1. Analisis Kebijakan	125
a. Kebijakan Arahkan Pertanian Dalam RTRW.....	125
b. Kebijakan KP2B	126
2. Analisis Kesesuaian antara tata ruang terhadap arahan pengembangan pertanian.....	133
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1.	Variabel Kebutuhan Data	42
Tabel 3.2.	Pembobotan SKL Morfologi	48
Tabel 3.3.	Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan	48
Tabel 3.4.	Pembobotan SKL Kestabilan Lereng	49
Tabel 3.5.	Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi	50
Tabel 3.6.	Pembobotan SKL Ketersediaan Air	51
Tabel 3.7.	Pembobotan SKL Untuk Drainase	52
Tabel 3.8.	Pembobotan SKL Terhadap Erosi	53
Tabel 3.9.	Pembobotan SKL Terhadap Bencana Alam	54
Tabel 3.10.	Klasifikasi Pengembangan Lahan	55
Tabel 3.11.	Arahan Tata Ruang Pertanian	55
Tabel 3.12.	Maktriks Perbandingan	56
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros	59
Tabel 4.2.	Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Maros	64
Tabel 4.3.	Rata-rata dan Kelembapan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2021	66
Tabel 4.4.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2021	67
Tabel 4.5.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Maros	69
Tabel 4.6.	Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Maros	74
Tabel 4.7.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2021	82
Tabel 4.8.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros tahun 2021	83
Tabel 4.9.	Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020	84

Tabel 4.10.	Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Bantimurung Tahun 2021	91
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Menurut Kelurahan di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020	98
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Jenis Kelamin Menurut Kelurahan di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020	100
Tabel 4.13	Luas Baku Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantimurung.....	101
Tabel 4.14	SKL Morfologi Kecamatan Bantimurung	102
Tabel 4.15	SKL Kemudahan Dikerjakan Kecamatan Bantimurung.	103
Tabel 4.16	SKL Kestabilan Lereng Kecamatan Bantimurung	104
Tabel 4.17	SKL Kestabilan Pondasi Kecamatan Bantimurung	105
Tabel 4.18	SKL Ketersediaan Air Kecamatan Bantimurung	106
Tabel 4.19	SKL Untuk Drainase Kecamatan Bantimurung	107
Tabel 4.20	SKL Terhadap Erosi Kecamatan Bantimurung	107
Tabel 4.21	SKL Terhadap Bencana Kecamatan Bantimurung.....	108
Tabel 4.22	SKL Analisis Kemampuan Lahan Kecamatan Bantimurung.....	110
Tabel 4.23	Arahan Pengembangan Lahan Pertanian Kecamatan Bantimurung.....	122
Tabel 4.24	Luas KP2B Kabupaten Maros.....	129
Tabel 4.25	Luasan KP2B Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantimurung.....	129
Tabel 4.26	Maktriks Perbandingan	135

DAFTAR GAMBAR

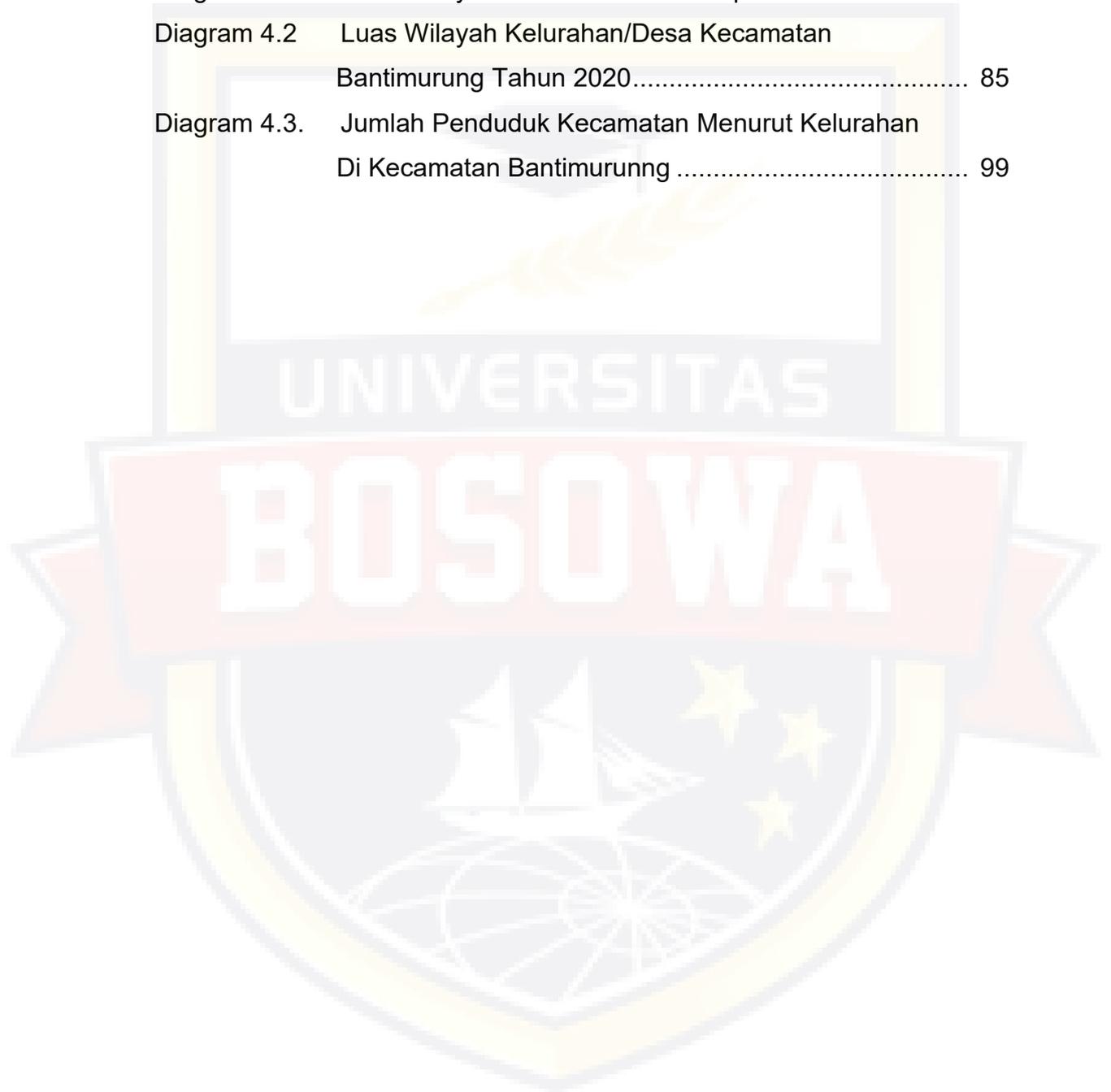
Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	27
Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian.....	40
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Maros	61
Gambar 4.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Maros	55
Gambar 4.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Maros	65
Gambar 4.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Maros	68
Gambar 4.5. Peta Penggunaan lahan Kabupaten Maros	70
Gambar 4.6. Peta Administrasi Kecamatan Bantimurung.....	86
Gambar 4.7. Peta Topografi Kecamatan Bantimurung	92
Gambar 4.8. Peta Morfologi Kecamatan Bantimurung.....	93
Gambar 4.9. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Bantimurung	94
Gambar 4.10. Peta Curah Hujan Kecamatan Bantimurung	95
Gambar 4.11. Peta Jenis Tanah Kecamatan Bantimurung.....	96
Gambar 4.12. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bantimurung	97
Gambar 4.13. Peta SKL Morfologi Kecamatan Bantimurung	112
Gambar 4.14. Peta SKL Kemudahan Di Kerjakan Kecamatan Bantimurung.....	113
Gambar 4.15. Peta SKL Kestabilan Lereng Kecamatan Bantimurung.....	114
Gambar 4.16. Peta SKL Kestabilan Pondasi Kecamatan Bantimurung ...	115
Gambar 4.17. Peta SKL Ketersediaan Air Kecamatan Bantimurung	116
Gambar 4.18. Peta SKL Untuk Drainase Kecamatan Bantimurung	117
Gambar 4.19. Peta SKL Terhadap Erosi Kecamatan Bantimurung	118
Gambar 4.20. Peta SKL Terhadap Bencana Kecamatan Bantimurung .	119
Gambar 4.21. Peta SKL Kemampuan Pengembangan Lahan Kecamatan Bantimurung.....	120
Gambar 4.22. Peta Arah Tata Ruang Pertanian	123
Gambar 4.23. Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Kecamatan	

Bantimurung.....	124
Gambar 4.24. Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B) Kecamatan Bantimurung.....	131
Gambar 4.25. Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Kecamatan Bantimurung.....	132
Gambar 4.26. Peta Overlay Kesesuaian Lahan Pertanian, Rencana Pola Ruang dan KP2B Kecamatan Bantimurung.....	144
Gambar 4.27. Peta Konsep Arah Pengendalian Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung	145



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros.....	60
Diagram 4.2	Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kecamatan Bantimurung Tahun 2020.....	85
Diagram 4.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bantimurung.....	99



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Sektor pertanian sampai saat ini masih berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan pertanian tersebut. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian di Indonesia adalah meningkatkan ketahanan pangan, sehingga berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan. Dalam upaya reorientasi peran strategisnya maka sektor pertanian kini dan mendatang selain di upayakan harus mampu memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, juga dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Negara Indonesia merupakan negara yang sejak dahulu dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang bertumpu pada sektor pertanian. Hal itu dikarenakan, hasil pertanian dikenal sangat melimpah di negara ini hingga bisa diekspor ke beberapa negara. Sehingga hal itu bisa meningkatkan ekspor dan pendapatan ekonomi negara Indonesia dan menjadi penopang hidup masyarakat Indonesia khususnya

para petani. Karena Indonesia menjadi negara agraris dan unggul di sektor pertaniannya maka banyak daerah – daerah di Indonesia sebagai lumbung padi dan berasnya bagi Indonesia.

Sektor pertanian merupakan sektor dominan bagi Sulawesi Selatan karena sebagai pemasok beras di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan salah satu lumbung pangan Nasional mempunyai luas panen tanaman padi seluas 991.935,52 ha dengan produksi padi 5.152.871,43 ton (BPS Sulawesi Selatan, 2022). Sebagian besar produksi padi Sulawesi Selatan dihasilkan oleh jenis padi sawah.

Kabupaten Maros termasuk salah satu sentra produksi tanaman pangan di Sulawesi Selatan selain kawasan Bosowasipilu, khususnya padi. Luas panen dan produksi padi masing-masing 40.258,85 ha dan 210.240,20 ton dengan produktivitas 52,22ku/ha. (BPS Sulawesi Selatan, 2022). Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km² terdiri dari 14 Kecamatan serta 103 Desa/Kelurahan, merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pengusahaan pertanian yang juga strategis salah satunya berada di Kecamatan Bantimurung.

Kecamatan Bantimurung seluas 173,7 km² pada sektor pertanian khususnya padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan Bantimurung. Namun petani yang ada di daerah ini, tidak terlepas dari permasalahan dalam menjalankan proses

usahataninya. Adapun luas pertanian Kecamatan Bantimurung seluas 4.175,81 Ha dan untuk peralihanrencana pola ruang Kabupaten Maros , di Kecamatan Bantimurung seluas 1.202,39 Ha yang terdiri dari kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan pertambangan batuan dan kawasan peternakan

Badan Pusat Statistik Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2021 pada sektor pertanian tercatat di tahun 2017 lahan sawah seluas 3964 Ha dan lahan bukan sawah seluas 12464 Ha tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 tercatat lahan sawah kecamatan bantimurung seluas 3800 Ha dan lahan bukan sawah seluas 32675 Ha jelas terlihat berkurangnya lahan sawah dan bertambahnya lahan bukan sawah .Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan lahan non pertanian tinggi maka seringkali lahan pertanian menjadi korban dalam alih fungsi lahan.

Tidak semua lahan yang tersedia cocok untuk kegiatan pertanian, demikian pula seringkali terjadi lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian, ternyata telah digunakan untuk kegiatan lainnya. Oleh karena itu maka perlunya kajian terkait **“Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros”** sebagai dasar dalam

pengendalian Kawasan pertanian dari maraknya alih fungsi lahan khususnya pada lahan pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di paparkan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung?
2. Bagaimana konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung
2. Memberikan konsep pengendalian alih fungsi lahan Kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan diatas maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya tentang arahan kesesuaian lahan pertanian.

- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah khususnya pengendalian kawasan pertanian dan pemerintah dapat mengacu pada hasil rekomendasi pengendalian alih fungsi lahan Kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui potensi lahan pertanian serta memahami arahan tata ruang. Sehingga pemahaman tentang pertanian bagi masyarakat, dapat mencegah ketidaksesuaian rencana dan arahan tata ruang.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Bantimurung, dalam penentuan batasan lokasi penelitian ini juga ditentukan dengan berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi. Sebagaimana pada Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan mengarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung sebagai Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya komoditas beras dan jagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan ini, maka dibuatkanlah sistematika penulisan yang secara garis besar menguraikan bab dan sub bab dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan judul yang diambil penulis yang di dalamnya akan membahas mengenai “Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros”.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini memuat tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, Teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum Kabupaten Maros, gambaran umum kecamatan bantimurung, serta tinjauan lokasi studi dan hasil analisis kesesuaian lahan pertanian untuk rekomendasi pengendalian alih fungsi kawasan pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Kawasan

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contoh kawasan antara lain: Kawasan Lindung Kawasan Budidaya dalam suatu wilayah provinsi. Kawasan Perkotaan- Kawasan Pedesaan dalam suatu wilayah kabupaten; Kawasan Perumahan, Kawasan Pusat Kota, dan Kawasan Industri dalam suatu kota. Termasuk juga kawasan permukiman yang bila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 bahwa Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kawasan merupakan batasan yang bersifat fungsional sesuai dengan peruntukannya.

B. Kawasan Pertanian

Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan. Namun demikian, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat dari alih fungsi lahan (Supratikno dkk. 2016; Utami 2019).

Secara umum pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sebagian besar

lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya tanaman pangan, padahal jika kita melihat lebih jauh, kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman dan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian dalam arti luas tidak hanya meliputi budidaya tanaman, tetapi juga membudidayakan dan mengelola bidang peternakan, seperti memelihara dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan banyak orang.

Undang - Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemberdayaan masyarakat perdesaan ditujukan diantaranya untuk mempertahankan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. Tujuan ini hendak dicapai melalui penataan ruang kawasan perdesaan yang dapat berbentuk kawasan pertanian dan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan perdesaan (Saragih, 2015).

Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (*multiplier effect*), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan (kesejahteraan) masyarakat.

Berdasarkan Permentan No.50 tahun 2012 Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Maksud dari pengembangan kawasan pertanian adalah untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan

pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian untuk:

- a. Meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi
- b. Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;
- d. Membenakan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian.
- e. Mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

Kawasan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan ataupun aktivitas pertanian yang menjadi salah satu kawasan yang mempunyai peran penting dalam membangun dan mempertahankan produksi pangan.

C. Pengertian Lahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia .

Lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga) (Jayadinata, 1992). Sedangkan menurut Sugandhy (1999) lahan merupakan permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia.

Pengertian lahan terbagi menjadi dua segi, yaitu berdasarkan segi geografi fisik dan segi ekonomi (Lichfield dan Drabkin, 1980). Berdasarkan segi geografi, lahan merupakan tanah yang tetap dalam lingkungannya dan kualitas fisik tanah sangat menentukan fungsinya. Sedangkan menurut segi ekonomi, lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tergantung dari produksinya. Lahan merupakan suatu komoditi yang memiliki harga, nilai dan biaya.

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976).

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Worosuprojo, 2007).

Lahan dapat disimpulkan sebagai hamparan dari permukaan yang terdiri dari komponen-komponen yang didalamnya tercakup sumberdaya alam, dan lahan juga merupakan suatu aspek dasar dalam tempat dari aktivitas dan kegiatan manusia.

D. Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Kelas kesesuaian suatu areal dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan (Sitorus, 1985). Untuk mendapatkan kesesuaian suatu lahan terhadap suatu komoditas tanaman maka dilakukan evaluasi lahan (Ade, 2010).

Menurut Rayes (2007) dalam Amatullah (2012) kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, drainase,

topografi, hidrolog dan atau drainase yang sesuai untuk usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif.

Kesesuaian lahan dapat disimpulkan sebagai kecocokan lahan terhadap peruntukan dan pemanfaatan yang semestinya, baik itu menurut kebijakan dan arahan yang ada maupun menurut aspek lingkungan yang semestinya.

E. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dalam menghadapi pembangunan, sektor pertanian masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, diantaranya adalah permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang saat ini terus mengalami peningkatan. Menurut Utomo (2009) Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya. Banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti, perumahan, jalan, industri, perkantoran, dan bangunan lain menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat di beberapa sektor ekonomi. Pertumbuhan tersebut juga membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara ketersediaan lahan relatif tetap menyebabkan

persaingan dalam pemanfaatan lahan. Kebanyakan lahan yang dialih fungsikan umumnya adalah lahan-lahan pertanian karena *land rent* (sewa lahan). Menurut Barlowe (2009), Sedangkan fenomena alih fungsi lahan pertanian merupakan dampak dari transformasi struktur ekonomi (pertanian ke industri), dan demografi (pedesaan ke perkotaan) yang pada akhirnya mendorong transformasi sumberdaya lahan dari pertanian ke non-pertanian (Supriyadi, 2004).

Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lainnya bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi juga pembangunan yang pesat di beberapa wilayah memerlukan jumlah lahan non pertanian yang mencukupi. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan *supply* bahan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (*land rent*) maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan. Semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan pencegahan alih fungsi lahan pertanian antara lain:

1. Undang – Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Tujuan Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sehingga menghindari kepunahan kawasan hijau (Janti et al., 2016):

- Melindungi Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan.
- Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- Mewujudkan rehabilitas pertanian.

2. Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, mengatur batas maksimum dan minimum pemilikan lahan pertanian dalam satu keluarga sebagai berikut:

- Luas maksimum sawah 10 ha, lahan kering 20 ha; luas maksimum ini tergantung pada kepadatan penduduk, tersedianya lahan yang dapat dibagi di wilayah tersebut dan faktor lainnya.

- Luas minimum ditetapkan 2 ha, baik sawah maupun lahan kering, dengan tujuan menghindari pemecahan (fragmentasi) pemilikan lahan pertanian. Untuk itu diadakan pembatasan pemindahan lahan pertanian yang menimbulkan pemilikan di bawah 2 ha, terkecuali dalam hal warisan.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, mengatur bahwa perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain (non-pertanian) dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional, seperti swasembada pangan.
 4. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengatur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan membagi habis wilayah administratif menurut fungsi (peruntukan) kawasan, termasuk di dalamnya kawasan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dengan ketentuan pengaturan tertentu.
 5. Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 juncto Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1996 juncto Keputusan Presiden nomor 98 tahun 1998 tentang Kawasan Industri, melarang perubahan penggunaan lahan pertanian subur untuk pembangunan Kawasan Industri.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan pengalihan peruntukan lahan atau perubahan fungsi lahan pertanian berubah menjadi kawasan non pertanian.

F. Kemampuan Lahan

Menurut Klingebiel dan Montgomery (1976) dalam (Satriawan & Fuady, 2014) menyebutkan bahwa kemampuan lahan pada dasarnya merupakan potensi lahan untuk berbagai penggunaan dalam sistem pertanian secara luas dan tidak menitik-beratkan pada peruntukkan jenis tanaman tertentu. Lahan dengan kelas kemampuan yang tinggi mempunyai potensi lebih besar untuk berbagai bentuk penggunaan dalam kegiatan pertanian secara intensif.

Kemampuan lahan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Kemampuan lahan adalah kapasitas suatu lahan untuk berproduksi (Anonim 2012). Kemampuan ini sering diartikan sebagai potensi lahan untuk penggunaan pertanian secara umum dengan kemampuan produksi dari tanah tersebut yang didasarkan pada faktafakta iklim, drainase dan kemiringan. Klasifikasi kemampuan lahan merupakan penilaian lahan

secara sistematis dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Arsyad,2006).

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M.2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang menjelaskan bahwa analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan. Output (keluaran) dari analisis ini adalah berupa peta kelas kemampuan lahan (zonasi) yang terdiri dari kawasan pengembangan, kawasan penyangga dan kawasan lindung sebagai gambaran dari tingkatan kemampuan lahan pada daerah perencanaan. Analisis kemampuan lahan ini bermaksud untuk mengkaji tingkatan kemampuan lahan untuk mengkaji tingkatan kemampuan lahan pada daerah studi berdasarkan aspek fisik dasar. Aspek fisik dasar merupakan salah satu materi yang diperlukan dalam rencana pengembangan suatu kota. SKL berdasarkan Sembilan analisis yang mengacu pada (Permen PU No 20 Tahun 2007), yaitu SKL Morfologi, SKL Kemudahan dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKI Untuk Drainase, SKL Terhadap Erosi, SKL Pembuangan Limbah, SKL Terhadap Bencana Alam, Kemudian Kesembilann SKL ini akan di overlay sehingga menghasilkan kemampuan lahan/ sesuai dengan klafisikasi kemampuan lahan.

1) Satuan kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau

kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya.

2) Satuan kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan atau pengembangan kawasan.

3) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan data dari peta topografi, peta kelerengan, dan peta morfologi.

Kestabilan lereng artinya wilayah tersebut dapat dikatakan stabil atau tidak kondisinya lahannya dengan melihat kemiringan lereng di lahan tersebut. Bila suatu kawasan disebut kestabilan lerengnya rendah, maka kondisi wilayahnya tidak stabil. Tidak stabil artinya mudah longsor, mudah bergerak yang artinya tidak aman dikembangkan untuk bangunan atau permukiman dan budi daya. Kawasan ini bisa digunakan untuk hutan, perkebunan dan resapan air.

4) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan dari analisis SKL Kestabilan Pondasi mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan (*Permen Pu No 20 Tahun, 2007*).

5) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

6) Satuan Kemampuan lahan (SKL) Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Drainase tinggi artinya aliran air mudah mengalir atau mengalir lancar. Drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang.

7) Satuan kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi sertaantisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

8) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

9) Kemampuan Pengembangan Lahan

Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai gambaran dalam pengembangan kota berkelanjutan. Analisis kemampuan lahan juga digunakan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Data-data yang dibutuhkan meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi :

- a. Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan.
- b. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan lahan ialah kapasitas suatu lahan dalam pengembangan kawasan ditinjau dari aspek fisik dan potensi suatu lahan tersebut.

G. Sistem Informasi Geografis

Menurut Rice (2000) dalam Prahasta (2014) Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem komputer untuk memasukkan (capturing), menyimpan (store/record), memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisinya di permukaan bumi. Setiap data dapat mengandung informasi spasial dan non spasial. Data spasial terdiri dari komponen *geometri primitive* yaitu titik, garis dan luasan. Data non spasial merupakan data pelengkap berisi informasi mengenai data spasial yang saling berhubungan. SIG dapat digunakan untuk pengolahan data yang bersifat

keruangan sehingga bukan tidak mungkin SIG dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi geospasial merupakan informasi tentang data spasial yang berupa bentuk permukaan bumi, gambaran tentang aspek geofisik wilayah yang menggunakan sistem komputer.

H. Tumpang Susun (*overlay*)

Menurut Prahasta (2014) tumpang susun (*Overlay*) adalah analisis spasial yang mengkombinasikan 1 dua tematik masukannya. Secara umum, teknis menganalisis ini terbagi ke dalam format datanya, yaitu:

1. Vektor Pada format ini, SIG membaginya dalam dua kelompok yaitu intersect dan union. Pada intersect, layer 2(dua) akan memotong layer 1 (satu) untuk menghasilkan layer output, sedangkan pada union, analisis spasial akan mengkombinasikan unsur-unsur spasial layer 1(satu) dan layer 2 (dua).
2. Raster Secara umum dalam format ini fungsi tumpang susun diwujudkan dalam bentuk operator aritmatika yang mencakup kebanyakan kasus dimana dua masukan citra digital digunakan untuk menghasilkan citra digital lainnya. Pada analisis spasial ini nilai piksel dikombinasikan dengan melibatkan operator aritmatika dan boolean untuk menghasilkan nilai piksel baru. Tumpang susun atau Overlay biasanya sering dilakukan bersamaan dengan proses skoring. Skoring adalah nilai yang diberikan terhadap poligon peta untuk merepresentasikan tingkat kedekatan.

Overlay dapat disimpulkan sebagai tumpang tindih atau pengumpulan data atau variabel yang memiliki informasi yang berbeda dengan tujuan mendapatkan satu informasi menyeluruh dari data yang berbeda.

I. Arahan Tata Ruang Pertanian

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan tersebut diberikan masukan- masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data Biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai (Ritung et al. 2007).

Arahan fungsi pemanfaatan lahan merupakan kajian potensi lahan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam suatu kawasan tertentu berdasarkan fungsi utamanya. Arahan analisis kesesuaian lahan merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis kemampuan lahan dimana memberikan arahan rekomendasi guna mengembangkan suatu daerah. Arahan tata ruang pertanian bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahan pertanian. Selanjutnya

keluarannya adalah peta kesesuaian lahan pertanian yang di kutip dari pedoman permen PU No.20 tahun 2007.

Adapun untuk klasifikasi dari keluaran peta arahan tata ruang pertanian adalah penentuan kawasan lindung, kawasan penyangga, tanaman tahunan dan tanaman setahun. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang membagi fungsi utama kawasan ke dalam dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

- a. Kawasan lindung dalam undang-undang tersebut adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan,
- b. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSP atau KSK yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tanaman Tahunan adalah istilah agrobotani bagi tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam. Menunjukkan bahwa yang dimaksud "satu musim" adalah satu tahap dalam setahun.
- d. Sedangkan tanaman semusim adalah tanaman tahunan atau tumbuhan tahunan merupakan istilah agrobotani bagi tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam.

Kawasan peruntukan pertanian pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2012-2032 mengarahkan pada pemanfaatan ruang untuk kawasan pertanian dikelompokkan pada peruntukan pertanian lahan basah (padi sawah dan perikanan) Dan pertanian lahan kering (tanaman pangan lahan kering, tanaman keras

tahunan, hutan produksi dan peternakan). Luas Kawasan budidaya pertanian di Kabupaten Maros seluas \pm 58,032 Ha.

a) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pertanian lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Luas kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Maros adalah 28.688 Ha.

b) Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering ini dipergunakan untuk tanaman palawija, hortikultura dan lain-lain. Kawasan budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Maros meliputi tanaman pangan lahan kering, tanaman keras tahunan, perkebunan, hutan produksi dan peternakan. Luas lahan budidaya pertanian lahan kering seluas 29.344 Ha.

c) Kawasan Pertanian Holtikultura

Kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Maros seluas kurang lebih 11.681 Ha terdapat di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan mallawa, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Tanralili, dan kecamatan Tompobulu.

Arahan tata ruang pertanian adalah pengendalian ataupun arahan dalam peruntukan kesesuaian lahan. Merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis kemampuan lahan dimana memberikan arahan rekomendasi guna mengembangkan suatu daerah.

J. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan dan untuk menjadi sebuah acuan dalam penulisan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai kesesuaian lahan pertanian dan rekomendasi pengendalian alih fungsi kawasan pertanian dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1.	Rachman Andriawan, Rochmat Martanto, Slamet Muryono (Tahun 2020)	Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sumenep	Metode Campuran Dengan Pendekatan Analisis Spasial	Tumpang susun (overlay)	Kesesuaian lahan masih lebih besar dengan total 81,55% dibandingkan dengan ketidaksesuaian lahan sebesar 18,45% sehingga ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi maupun tinjauan kembali terkait kawasan yang terdapat dalam Perda PLP2B agar sejalan dan sesuai peruntukannya dengan RTRW.

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
2.	Indah Rochmatika Sari (Tahun 2020)	Analisis Kesesuaian Kebijakan Pangan Berkelanjutan Terhadap Kondisi Pertanian Kabupaten Pringsewu	Metode deskriptif kualitatif,	Tumpang Susun (Overlay), Metode AHP (Analytical Hierarchy Process	<p>1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu belum melakukan Penerapan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B terhadap Peraturan Dearah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015 tentang PLP2B.</p> <p>2. Kurangnya lahan baku sawah sedangkan untuk penggunaan lainnya lebih luas seperti lahan permukiman dan perkebunan tercatat lebih luas</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
3.	Slamet Muryono, dkk (Tahun 2020)	Analisis Spasial Kesesuaian Antara Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Saat Ini Dan Rencana Tata Ruang	Metode Kualitatif	Analisis Deskriptif, Dan Analisis Tumpang Susun (<i>Overlay</i>)	<p>1. Data Spasial LP2B berupa peta yang secara definitif disepakati oleh dinas/instansi terkait yang berwenang menyangkut LP2B sampai saat ini belum ada.</p> <p>2. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap RTRW yaitu seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dari luas wilayah, dan Ketidakesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
		Wilayah (Studi Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)			
4.	Zulkarnain, RM.Nur Hartanto. (Tahun 2020)	Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan	Metode Kualitatif	Analisis Kesesuaian lahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu seluas 98.810 ha yang meliputi 11.879 ha lahan untuk pengembangan komoditi padi sawah dan

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
.		Di Kabupaten Mahakam Hulu			84.931 ha lahan untuk pengembangan komoditi padi ladang.
5.	Fahmi Rizal, Ganjar Herdiansyah (Tahun 2016)	Analisis Potensi Lahan Pertanian Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kota Bandung	Metode Kualitatif	Analisis deskriptif melalui evaluasi kesesuaian lahan	Potensi luas lahan pertanian pangan di Kota Bandung yaitu dengan kelas kesesuaian lahan S1, S2 dan S3 mencapai 847,66Ha. Dibandingkan dengan beberapa kota yang ada di Jawa Barat (rata-rata dibawah 500 Ha) ketersediaan lahan pertanian Kota Bandung lebih luas

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
6.	Praditya Ahmad Rifandi, Rizal Ichsan Syah Putra (Tahun 2021)	Evaluasi Kesesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Komoditas Padi (<i>Oryza sativa</i>) di Kecamatan Petarukan	Metode Kualitatif	Analisis Kesesuaian Lahan	Areal persawahan padi irigasi dengan rencana pola ruang LP2B di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang memiliki total luasan ±4.815 Ha, dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian lahan tersebut besar termasuk pada Kelas kesesuaian Sangat Sesuai (S1) untuk tanaman padi di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sekitar 4.404,87 ha atau 91,5% dan yang masuk dalam Kriteria kesesuaian tanah termasuk Cukup Sesuai (S2) dengan luasan 410,21 ha atau 8,5% yang terletak

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
.		Kabupaten Pemalang			<p>pada Desa Nyamplungsari sebagaimana data yang disajikan pada Gambar 5 dan Tabel 4. Tidak ada lahan sawah di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang termasuk pada Kelas kesesuaian Marginal (S3). Berdasarkan penelitian ini diketahui komoditas padi di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan kelas kesesuaian tertinggi (S1) yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai kawasan LP2B</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
.					mencapai 91,5% dengan luasan lahan seluas 4.404,87 ha.
7.	Yuchi Elchika Putri, Ahyuni, Endah Purwaningsih (2016)	Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Komoditi Padi	Metode Kuantitatif	Penelusuran literatur, metode overlay	Hasil penelitian ini menumkan penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) komoditi padi sawah Kabupaten Dharmawasraya berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas yang berada pada lahan pertanian lahan basah yaitu lahan yang

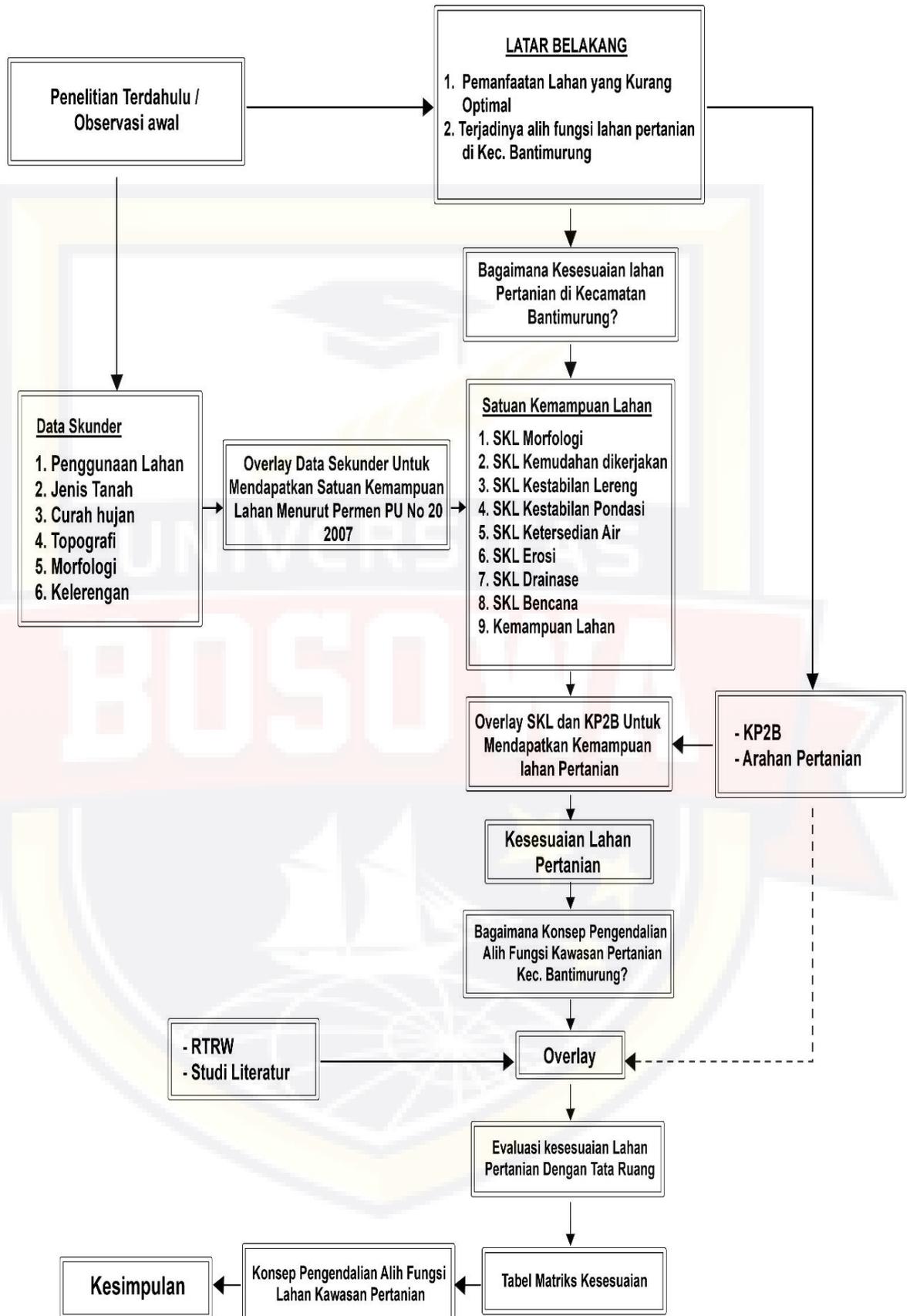
No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
.		Sawah Di Kabupaten Dharmasraya			<p>memenuhi (angka) kriteria karakteristik lahan yang berjumlah 10 jenis karakteristik lahan yang dengan kondisi sesuai adapun kriteria karakteristik lahan yang dimiliki lahan tersebut lahan dengan bahan kasar tanah sedikit, batuan lepas di permukaan tanah sediltsampai sedang, curah ujan $0 < Q, 60$, kondisi drainase tanah baik, tingkat bahaya erosi tanah ringan, tingkat genangan dengan empat keas diantaranya : tidak ada, ringan , sedang, dan agak berat, kedalaman tanahsedang dan dalam ,</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
.					<p>keasaman tanah agak asam sampai agak alkalis (5,6-8,5 pH), kelereng kecil dari 8, dan singkapan batuan dengan kondisi baik. Penentuan penempatan lahan pertanian pangan berkelanjutan komoditi padi sawah Kabupaten Dharmasraya juga didukung dengan infrastruktur dasar yakni lahan yang terletak pada Kawasan irigasi teknis sebrana lahan pertanian pangan berkelanjutan komoditi padi sawah di Kabupaten Dharmawasraya juga didukung dengan infrastruktur dasar yakni lahan yang</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
.					terletak pada Kawasan irigasi teknis sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan komoditi sawah

K. Kerangka Fikir

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka fikir dari penelitian ini sebagai berikut, **(gambar 2.1)**



Gambar 2.1 Kerangka Fikir Penelitian

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki berbagai macam jenis bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan jenis metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif.

Menurut para ahli Metode kuantitatif adalah metode survei dan eksperimen, (*Creswell, 2009*) Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat melakukan pengukuran, peneliti melakukan kajian dari berbagai macam literatur yang terkait dengan hasil pengamatan langsung dilapangan yang di jabarkan kedalam beberapa komponen sub variabel/indikator.

Pemilihan jenis penelitian pada penelitian ini memberikan alat bantu analisis permasalahan terkait kesesuaian lahan pertanian Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dan memberikan informasi terkait rekomendasi Kecamatan Bantimurung dalam pengendalian alih fungsi kawasan pertanian dengan metode skoring pada satuan kemampuan lahan.

B. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu proses penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bantimurung yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Maros. Secara administrasi wilayah Kecamatan Bantimurung memiliki luas wilayah 173,70 Km² dengan keadaan geografi yaitu daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran. Dari delapan daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut. (Gambar 3.1).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 2015).
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2015).

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer (Sugiyono, 2018).
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018).

Tabel 3.1 Variabel Kebutuhan Data

Rumusan Masalah	Variabel	Sumber data	Jenis Data	Tujuan
1. Bagaimana kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung?	Peta Penggunaan Lahan	Data RTRW	Sekunder	Bahan analisis SKL
	Peta jenis tanah	Data tematik RTRW	Sekunder	Bahan analisis SKL
	Peta Curah Hujan	CHRS	Sekunder	Bahan Analisis SKL
	DEMNAS	INA-Geoportal	Sekunder	Kemiringan lereng, topografi, dsb.
	Peta Geologi	ESDM	Sekunder	Bahan Analisis SKL
	SKL Morfologi	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kestabilan Pondasi	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kestabilan Lereng	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kemudahan dikerjakan	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Ketersediaan Air	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Erosi	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian

Rumusan Masalah	Variabel	Sumber data	Jenis Data	Tujuan
	SKL Drainase	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Bencana	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
2. Bagaimana konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung?	Arahan kesesuaian lahan pertanian	Hasil analisis	Primer	Bahan kajian konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan bantimurung
	Peta pola ruang	Data RTRW	Sekunder	Integrasi terhadap konsep pengendalian alih fungsi kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung
	KP2B	Data RTRW Provinsi	Sekunder	Konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung

Sumber : Olahan Peneliti 2022

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, data spasial, data kebijakan data statistic, dan dengan metode dokumentasi .

1. Observasi Lapangan

Menurut Sugiyono (2014) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi lapangan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kondisi Eksisting kawasan pertanian di area perkotaan
- 2) Kondisi eksisting Kawasan pertanian di area pedesaan
- 3) Kondisi eksisting kawasan pertanian di area KP2B

2. Data Spasial

Menurut Husssein, Hasan. (2021) Data spasial adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Data spasial sering juga disebut

dengan data geospasial, data geografis, atau geodata. Seiring dengan berkembangnya produksi data, jumlah data spasial bertambah dengan pesat. Data spasial yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Peta Tematik
- 2) Peta Administrasi wilayah, dst.

3. Data Kebijakan

Data kebijakan merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan yang memuat rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Adapun data kebijakan yang digunakan pada penelitian ini adalah data RTRW dan KP2B.

4. Data Statistik

Data statistik adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi mentah dari mana statistik dibuat. Statistik adalah hasil analisis data, interpretasi, dan

penyajianya. Dengan kata lain, beberapa komputasi telah dilakukan yang memberikan pemahaman tentang arti data statistik seringkali, meskipun tidak harus, disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau grafik. Definisi data statistik menurut para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Anhar, data statistik adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi.
- 2) Menurut Haer Talib, data statistik adalah sebagai sekumpulan fakta dan sebuah fakta tak lain adalah sebuah kenyataan atau kejadian.

Adapun pada penelitian ini data statistik yang di gunakan peneliti adalah data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros .

5. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis” (Burhan, 2008). Metode ini adalah usaha untuk mengumpulkan data atau informasi dengan menyalin data yang sudah diterbitkan oleh suatu institusi. Pada dokumentasi

dokumentasi penelitian ini di peroleh dari berbagai publikasi, laporan buku literatur, jurnal dan makalah yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Dari uraian tersebut maka tahap pembahasan dan analisa data dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung peneliti menggunakan teknik skoring dari satuan kemampuan lahan sesuai dengan Permen PU No.20 tahun 2007 tentang permen pu no 20. Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan bahwa Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terdiri dari beberapa SKL diantaranya :

a. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Adapun parameter data dan pemberian nilai

dalam menganalisis skl morfologi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pembobotan SKL Morfologi

No	Peta Kemiringan (%)	Peta Morfologi	SKL Morfologi	Nilai
1.	0-2	Dataran	Tinggi (9-10)	5
2.	2-5	Landai	Cukup (7-8)	4
3.	5-15	Perbukitan Sedang	Sedang (5-6)	3
4.	15-40	Pegunungan/ Perbukitan Terjal	Kurang (3-4)	2
5.	>40	Pegunungan/ Perbukitan Sangat Terjal	Rendah (1-2)	1

Sumber : Permen PU No 20 Tahun 2007

b. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan atau pengembangan kawasan.

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis skl kemudahan dikerjakan lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

No	Topografi (md pl)	Morfologi	Lereng	Jenis tanah	Penggunaan Lahan	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
1.	0 – 250	Datar	>40 %	Aldosol, podsolik, dst	Lahan Non Terbangun	Kemudahan Dikerjakan cukup	4

2.	250 – 500	Bero mbak	25 – 40%	Brown Forest Soil,dst		Kemudahan Dikerjakan Sedang	3
3.	500 – 150 0	Berg elom bang	15 – 25 %	Latosol	Lahan Terbangun	Kemudahan Dikerjakan Rendah	2
4.	150 0 – 300 0	Berb ukit	2 – 15 %	Aluvial,d st		Kemudahan Dikerjakan Sangat Rendah	1
5.	> 300 0	Berg unun g	0 – 2 %				

Sumber : Permen PU No 20 Tahun 2007

c. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan data dari peta topografi, peta kelerengan, dan peta morfologi.

Kestabilan lereng artinya wilayah tersebut dapat dikatakan stabil atau tidak kondisinya dengan melihat kemiringan lereng di lahan tersebut. Bila suatu kawasan disebut kestabilan lerengnya rendah, maka kondisi wilayahnya tidak stabil. Tidak stabil artinya mudah longsor, mudah bergerak yang artinya tidak aman dikembangkan untuk bangunan atau permukiman dan budi daya. Kawasan ini bisa digunakan untuk hutan, perkebunan dan resapan air.

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Kestabilan Lereng lebih jelasnya pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Pebobotan SKL Kestabilan Lereng

No	Morfologi	Lereng	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
1.	Datar	0 – 2 %	0 – 250	Aluvial, dst	0 - 100	Lahan Non Terbangun	Kestabilan Lereng Tinggi	5
2.	Berombak	2 – 15 %	250 – 500	Latosol			Kestabilan Lereng Cukup	4
3.	Bergelombang	15 – 25 %	500 – 1500	Brown Forest Soil, dst	100 – 300	Lahan Terbangun	Kestabilan Lereng Cukup	3
4.	Berbukit	25 – 40 %	1500 – 3000	Andosol, Podsolik, dst	300 – 500		Kestabilan Lereng Rendah	2
5.	Bergunung	>40 %	>3000	Regosol, Litosol, dst	0 - 100			

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

d. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan dari analisis SKL Kestabilan Pondasi mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jeni-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Kestabilan Pondasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

No	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan	SKL Kestabilan Lereng	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
1.	Andosol, Podsolik, dst.	Lahan Non Terbangun	Kestabilan Lereng Rendah	Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Rendah	1
2.	Brown Forest Soil, dst		Kestabilan Lereng Sedan		
3.	Latosol	Lahan Terbangun	Kestabilan Lereng Cukup	Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Kurang	2
4.	Aluvial, dst		Kestabilan Lereng Tinggi		

Sumber : Permen Pu No 20 Tahun 2007

e. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Ketersediaan Air lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Pembobotan SKL Ketersediaan Air

No.	Morfologi	Lereng	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
1	Bergunung	>40%	Andosol, Podsolik, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Ketersediaan Air rendah	1
2	Berbukit	25 – 40%	Brown Forest Soil, dst	300 – 500		Ketersediaan Air Kurang	2

3	Bergelombang	15-25 %	Latosol	100 – 300	Lahan Terbangun	Ketersediaan Air Sedang	3
4	Berombak	2-15%	Aluvial, dst	0 – 100		Ketersediaan Air Tinggi	5
5	Datar	0-2 %					

Sumber : Permen Pu No 20 Tahun 2007

f. Satuan Kemampuan lahan (SKL) Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Drainase tinggi artinya aliran air mudah mengalir atau mengalir lancar. Drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang.

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Untuk Drainase lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Pembobotan SKL Untuk Drainase

No.	Morfologi	Lereng	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
1	Bergunung	>40%	>3000	Andosol, Podsolik, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Ketersediaan Air rendah	1
2	Berbukit	25 – 40%	1500 – 3000	Brown Forest Soil, dst	300 – 500		Ketersediaan Air Kurang	2
3	Bergelombang	15-25 %	500 – 1500	Latosol	100 – 300	Lahan Terbangun	Ketersediaan Air Sedang	3
4	Berombak	2-15%	250 – 500	Aluvial, dst	0 - 100		Ketersediaan Air Tinggi	5
5	Datar	0-2 %	0 – 250					

Sumber : Permen Pu No 20 Tahun 2007

g. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Terhadap Erosi lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Pembobotan SKL Terhadap Erosi

No.	Morfologi	Lereng	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Terhadap Erosi	Nilai
1.	Bergunung	>40%	Regosol, Litosol, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Erosi Tinggi	1
2.	Berbukit	25 – 40%	Andosol, Podsolik, dst	300 – 500		Erosi Cukup tinggi	2
						Erosi Sedang	3
3.	Bergelombang	15-25 %	Brown Forest Soil. Dst	100 – 300	Lahan Terbangun	Erosi Sangat Rendah	4
4.	Berombak	2-15%	Aluvial , dst	0 - 100		Tidak Ada Erosi	5
5.	Datar	0-2 %					

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

h. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi

kerugian dari korban akibat bencana tersebut. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Terhadap Bencana Alam lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Pembobotan SKL Terhadap Bencana Alam

No.	Morfologi	Lereng	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Bencana Alam	Nilai
1	Bergunung	>40%	>3000	Andosol, Podsolik, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Potensi Bencana Alam Tinggi	5
2	Berbukit	25 – 40%	1500 – 3000	Brown Forest Soil, dst	300 – 500			
3	Bergelombang	15-25 %	500 – 1500	Latosol	100 – 300	Lahan Terbangun	Potensi Bencana Alam Cukup	4
4	Berombak	2-15%	250 – 500	Aluvial, dst	0 - 100		Potensi Bencana Alam Kurang	1
5	Datar	0-2 %	0 – 250					

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

i. Kemampuan Pengembangan Lahan

Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai gambaran dalam pengembangan kota berkelanjutan. Analisis kemampuan lahan juga digunakan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Data-data yang dibutuhkan

meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi

- a. Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan.
- b. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi Kawasan

Adapun klasifikasi dalam pengembangan lahan lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Klasifikasi Pengembangan Lahan

Klasifikasi	Keterangan
Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah
Kelas B	Kemampuan Pengembangan rendah
Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang
Kelas D	Kemampuan Pengembangan Tinggi
Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

j. Arahan Tata Ruang Pertanian

Arahan tata ruang pertanian bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahannya. Adapun klasifikasi dalam arahan rasio tutupan lahan lebih jelasnya bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.11 Arahan Tata Ruang Pertanian

Klasifikasi	Kemampuan Lahan	Arahan Tata Ruang Pertanian	
	Kemampuan Pengembangan	Klasifikasi	Nilai
Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	Lindung	1
Kelas B	Kemampuan Pengembangan rendah	Kawasan Penyangga	2

Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang	Tanaman Tahunan	3
Kelas D	Kemampuan Pengembangan Tinggi	Tanaman Setahun	4
Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	Tanaman Setahun	5

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

- Untuk rekomendasi pengendalian Kawasan pertanian menggunakan studi literatur dan analisis *overlay* serta maktris perbandingan rancangan tata ruang Kawasan pertanian Kabupaten Maros. Berikut contoh maktris perbandingan:

Tabel 3.12 Matriks Perbandingan

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW	KP2B	Luas	Konsep Rekomendasi
1.

F. Definisi operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pengertian yang operasional dalam penelitian. Definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrument penelitian, berikut definisi operasional dari penelitian ini;

1. RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.

2. Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

3. Satuan Kemampuan Lahan

Satuan kemampuan lahan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan agar dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan dan mengkaji tingkatan kemampuan lahan pertanian pada daerah Kecamatan Bantimurung berdasarkan aspek fisik dasar.

4. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengawasan, perbandingan, dan perbaikan kinerja. Sebagai langkah terakhir di proses manajemen, pengendalian memberikan kaitan kembali ke perencanaan. Jika manajer tidak mengendalikan, manajer tidak akan mengetahui apakah tujuan telah tercapai.

6. Kawasan Pertanian

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan

budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

7. KP2B

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dimaksudkan untuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari laju konversi lahan pertanian dan menyelamatkan lahan pertanian pangan dari kebutuhan konsumsi lahan diluar pertanian, disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (UU No. 41 tahun 2009).

8. Arahan Kemampuan Lahan Pertanian

Arahan tata ruang pertanian di Kecamatan Bantimurung bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahan Pertanian. Selanjutnya keluarahannya adalah peta kesesuaian lahan pertanian yang di kutip dari pedoman permen PU no.20 tahun 2007.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Maros

1. Aspek Fisik Dasar

1) Wilayah Administrasi

Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kabupaten Maros berada pada koordinat $40^{\circ} 45' - 50^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 205' - 129^{\circ} 12'$ Bujur Timur. Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administrasi luas wilayah Kabupaten Maros sebesar $1.619,12 \text{ Km}^2$ dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

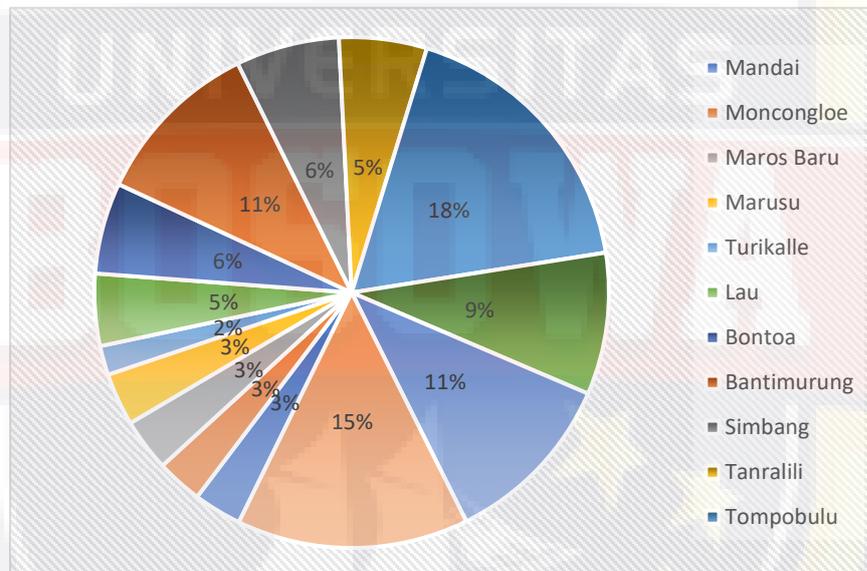
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Mandai	49,11
2	Moncongloe	46,87
3	Maros Baru	53,76
4	Marusu	53,73
5	Turikalle	29,93
6	Lau	73,83

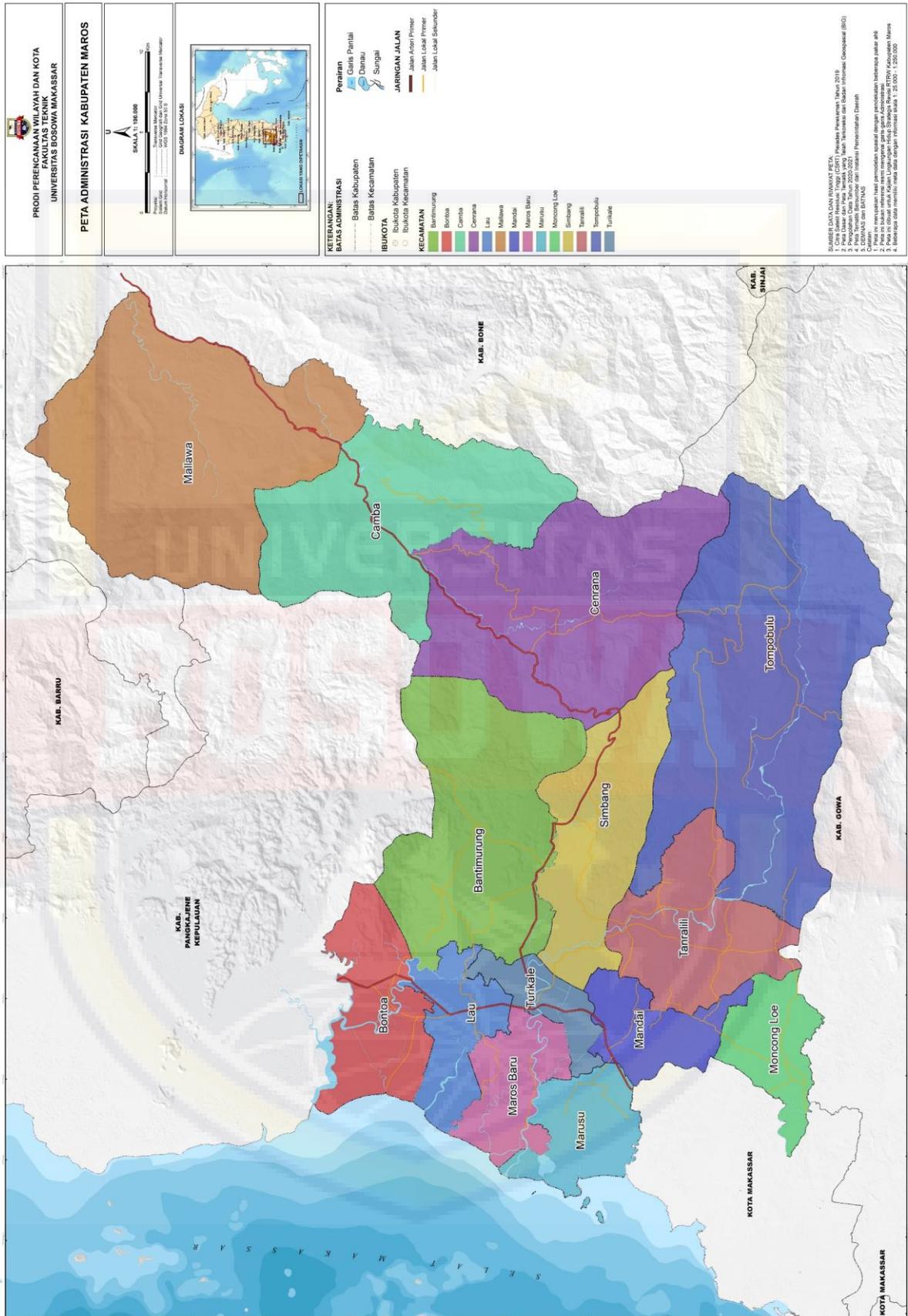
7	Bontoa	93,52
8	Bantimurung	173,7
9	Simbang	105,31
10	Tanralili	89,45
11	Tompobulu	287,66
12	Camba	145,36
13	Cenrana	180,97
14	Malawa	235,92
	Maros	1.619,12

Sumber : BPS Kabupaten Maros dalam angka 2022

Diagram 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros



Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2022



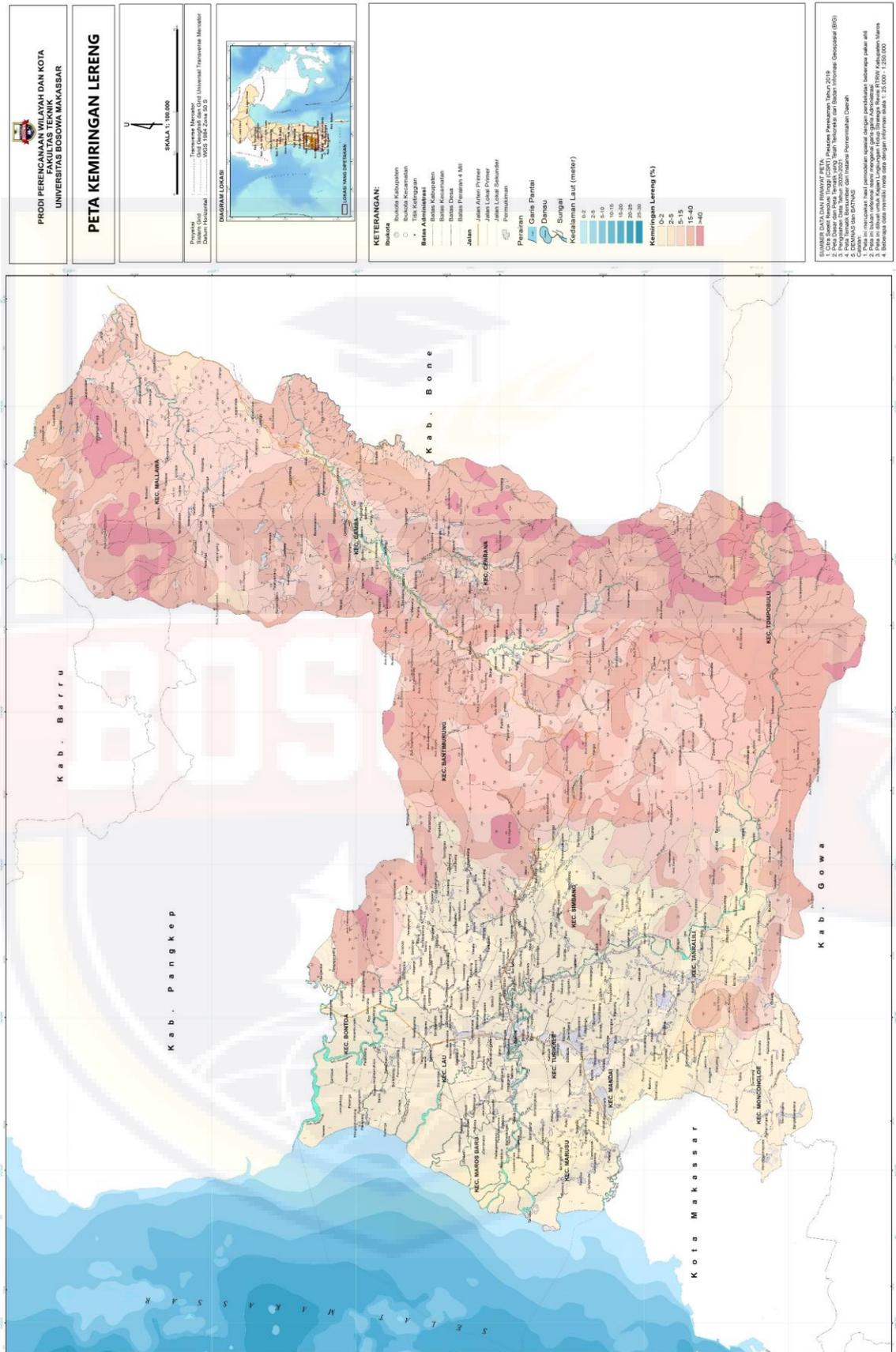
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros

2) Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng merupakan bentuk dari variasi perubahan permukaan bumi secara global, regional atau dikhususkan dalam bentuk suatu wilayah tertentu. Variabel yang digunakan dalam pengidentifikasian kemiringan lereng adalah sudut kemiringan lereng, titik ketinggian diatas muka laut dan bentang alam berupa bentukan akibat gaya satuan geomorfologi yang bekerja.

Secara definisi bahasanya lereng merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki sudut miring dan beda ketinggian pada tempat tertentu, sehingga dapat ditarik suatu nilai bahwa dari sudut (kemiringan) lereng merupakan suatu variabel beda tinggi antara dua tempat, yang dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. Adapun dapat diklasifikasikan pengelompokan sudut lereng yang terdapat di Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut :

- a. Wilayah Sudut Lereng <2%
- b. Wilayah Sudut Lereng 2 - 5%
- c. Wilayah Sudut Lereng 5 - 15%
- d. Wilayah Sudut Lereng 15 - 40%
- e. Wilayah Sudut Lereng > 40%



Gambar 4.2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Maros

3) Jenis Tanah

Kabupaten Maros memiliki jenis tanah yang bervariasi, dimana jenis tanah yang mendominasi Kabupaten Maros adalah Litosol, hal ini merupakan hasil bentukan batuan induk yang pada umumnya formasi Camba dan Tonasa yang didominasi oleh batuan gunung api mempengaruhi jenis tanah, untuk sebaran jenis tanah kabupaten Maros dapat dilihat pada **tabel.4.2** :

Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Maros

Jenis Tanah	Litologi Batuan	Luas (KM ²)	Sebaran (Kecamatan)
Alluvial Muda	Endapan Alluvial	14,20% (229,91)	Lau, Bontoa, Turikale Maros Baru, Moncongloe, Marusu, Mandai, Camba, Bantimurung, Tanralili, Tompobulu
Regosol	Batuan Vulkanik dan Lapukan Gunungapi	26,50% (429,06)	Cenrana, Camba, Mallawa, Tompobulu,
Litosol	Batuan beku/sedimen dan lapukannya	37,60% (608,79)	Mallawa, Camba, Bantimurung, Cenrana, Simbang, Mandai, Tompobulu, Tanralili
Mediterranean	Batuangamping & Lapukan	21,70% (351,35)	Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tompobulu, Tanralili

4) Iklim

Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,70 °C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,5 °C (terjadi pada bulan Juli 2021) sedangkan yang paling tinggi adalah 31,5 °C (terjadi pada bulan Juni 2021). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Rata-rata dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2021

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	39,3	24,4	26,2	97	77	91
Februari	39,9	24,3	26,4	98	81	91
Maret	30,3	24,3	26,6	96	78	90
April	31,1	24,1	27,1	94	77	84
Mei	32,1	24,9	27,9	92	75	81
Juni	31,5	24,2	27,2	90	66	82
Juli	31,1	23,5	26,7	89	67	82
Agustus	32,5	24,4	27,8	90	51	76
September	32,2	24,8	27,9	83	49	77
Oktober	27,8	24,7	27,8	88	54	83
November	37,2	24,6	27,2	93	69	86
Desember	26,7	24,5	26,7	97	77	88

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2022

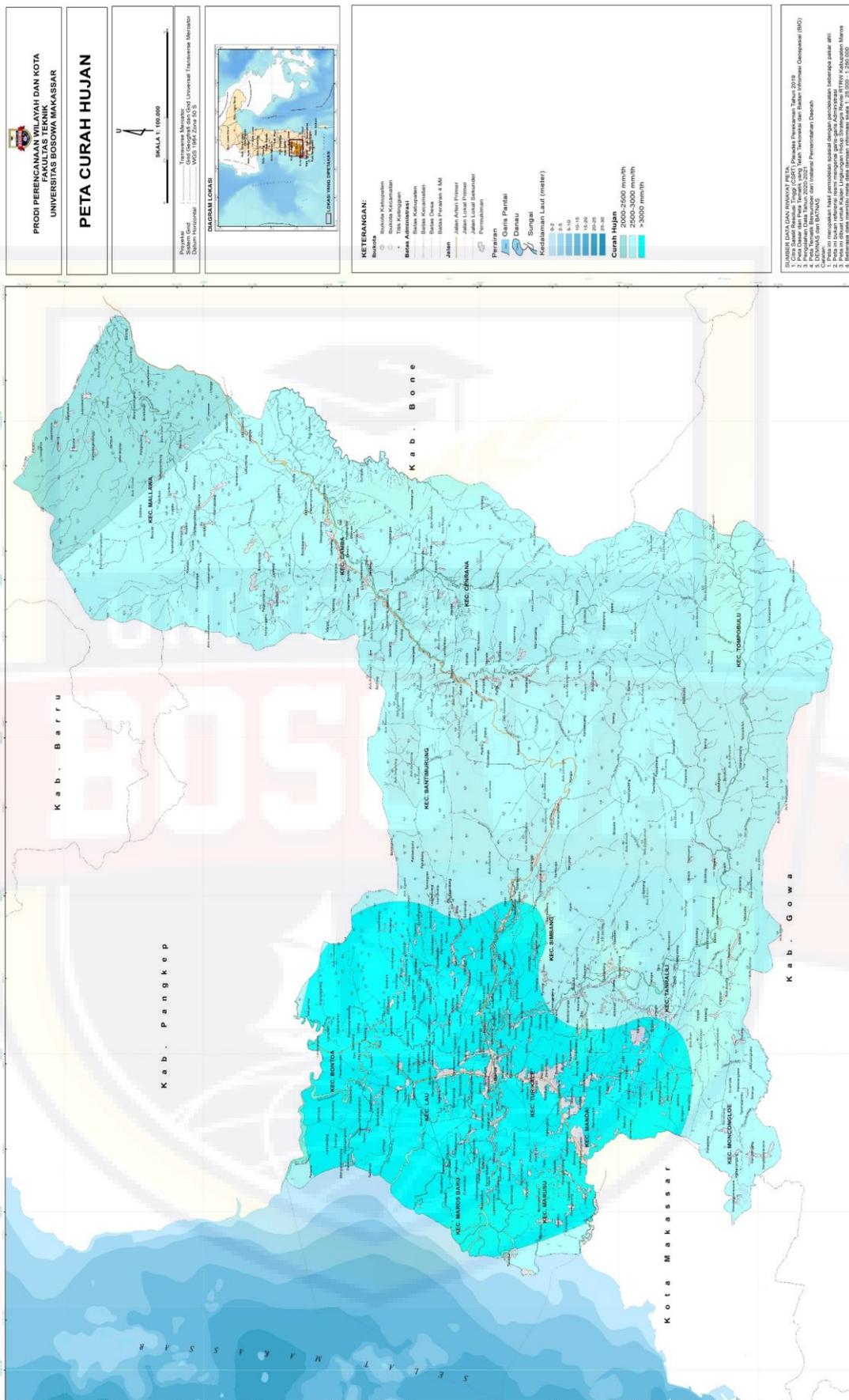
5) Curah Hujan

Iklm Kabupaten Maros tergolong iklim tropis dengan curah hujan rata-rata sekitar 404 mm³ setiap bulannya, dengan jumlah 237 hari hujan berkisar hari selama Tahun 2021. Pada bulan Januari curah hujan menyentuh angka 862 mm³ , dimana ini merupakan curah hujan tertinggi di tahun 2021, dan di bulan Agustus sampai Oktober tidak terjadi curah hujan 0 mm³, untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm ²)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	820	31	34
Februari	421	22	46
Maret	628	25	58
April	298	14	66
Mei	77	15	70
Juni	87	15	75
Juli	79	16	60
Agustus	704	12	80
September	84	13	68
Oktober	245	20	78
November	542	26	56
Desember	862	28	38

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2022



Gambar 4.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Maros

6) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan perkembangnya tuntutan hidup yang akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat.. Penggunaan lahan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Maros

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentasi (%)
Hutan Bakau/Mangrove	139.37	0.097
Sungai	1067.18	0.741
Perkebunan/Kebun	2672.76	1.857
Permukiman	2956.33	2.054
Sawah	25178.11	17.493
Semak Belukar	13062.81	9.076
Tanah Kosong/Gundul	874.26	0.607
Tegalan/Ladang	11894.25	8.264
Danau/Situ	23.89	0.017
Padang Rumput	81.11	0.056
Hutan Rimba	73824.31	51.292
Sawah Tadah Hujan	1853.80	1.288
Pasir/Bukit Pasir Darat	43.93	0.031
Bandara	523.16	0.343
Tambak	9441.25	6.560
Hutan Rawa/Gambut	25.81	0.018
Empang	0.59	0.000
Tambang	257.55	0.179
Tanah Kosong/Gundul	5.37	0.004
Padang Rumput	5.37	0.004

Sumber : Shapefile Penggunaan Lahan Kabupaten Maros

2. Tata Ruang

1) Tujuan, Kebijakan dan Startegi Penataan ruang Wilayah

Kabupaten Maros

a) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Maros

Penataan Ruang Kabupaten Maros bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.

b) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Maros

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b) Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki;
- c) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d) Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
- f) Pengembangan potensi pariwisata;
- g) Pengembangan potensi pertambangan;
- h) Pengembangan potensi industri;
- i) Pengembangan potensi perdagangan;
- j) Pengembangan potensi pendidikan;
- k) Pengembangan potensi permukiman; dan
- l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Maros

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Maros meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan

lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (*upstream*) Daerah Aliran Sungai (DAS), (ii) konservasi berupa taman margasatwa. Selain daripada itu, untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budi daya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan jalan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Pola pemanfaatan daerah perkotaan diarahkan juga dapat terwujud tatanan lingkungan yang swatata dalam memproduksi dan mengolah daya penentralisiran limbah.

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maros.

Tabel 4.6 Luas Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Maros

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
1	Kawasan Bandara	384	0.26
2	Kawasan Hutan Lindung	14.611	10.05
3	Kawasan Hutan Produksi	15.364	10.57
4	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	6.434	4.43
5	Kawasan Konservasi	28.611	19.69
6	Kawasan Mangrove	135	0.09
7	Kawasan Perikanan	286	0.20
8	Kawasan Perkebunan	7.165	4.93
9	Kawasan Permukiman	3.442	2.37
10	Kawasan Pertambangan	48	0.03
11	Kawasan Pertanian Lahan Kering	29.344	20.19
12	Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah	28.688	19.74
13	Kawasan Tambak	987	6.74
14	Sungai	1.010	0.70
Total		145.311	100

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2011(RTRW KAB.MAROS 2012-2032)

Arahan kawasan lindung ditetapkan dengan dasar sebagai berikut:

1. Menetapkan kawasan lindung sebesar minimal 30% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Maros yang dikelompokkan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) atau biasa disebut juga Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, termasuk berbagai kawasan konservasi.
2. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air.
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

3) Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Maros

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa;

- a) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah

Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, Sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu;

- Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu;
- Kawasan Industri Manufaktur diarahkan di kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu; dan

- Kawasan industri Semen Bosowa terdapat di Kecamatan Bantimurung;

b) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- Kawasan wisata bahari diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Hutan Lindung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
- Kawasan penambangan kapur diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- Kawasan penambangan marmer diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;
- Kawasan penambangan marmer diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;

- Kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; dan
- Kawasan Kebun Raya Pucak diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanralili.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri atas:

a) KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Maros diarahkan pada:

- Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;
- Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kecamatan Kabupaten Maros;
- Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru;
- Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;

- Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;
 - Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di Kecamatan Turikale;
 - Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di Kecamatan Turikale;
 - Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
 - Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan
 - Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.
- b) KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya
- Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya di Kabupaten Maros meliputi;
 - Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru;
 - Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang; dan
 - Kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Patte'ne Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.

c) KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi

- Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi di Kabupaten Maros, terdiri atas :
- Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu;
- Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Mallawa;
- Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan
- Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.

d) KSK Dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

- Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Maros meliputi ;
- Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung;
- Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang Kecamatan Cenrana; dan

- Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Kecamatan Mallawa.

e) KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 - Kawasan Lapangan Udara (LANUD) Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
 - Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Sambueja Kecamatan Simbang; dan
 - Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango Kecamatan Tanralili.

3. Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Maros dalam angka tahun 2022, penduduk Kabupaten Maros pada Tahun 2021 sebanyak 396.924 jiwa, dan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Mandai dengan jumlah penduduk 53.406 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada (tabel 4.4) berikut:

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Mandai	53.406
2	Moncongloe	24.336
3	Maros Baru	28.613
4	Marusu	35.105
5	Turikalle	48.963
6	Lau	27.686
7	Bontoa	30.799
8	Bantimurung	33.082
9	Simbang	25.697
10	Tanralili	31.448
11	Tompobulu	16.004
12	Camba	14.291
13	Cenrana	14.553
14	Malawa	12.941
	Maros	396.924

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2022

2) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Maros dapat dilihat pada penjelasan (tabel 4.8) :

**Tabel 4.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km ²)
1	Mandai	1.087
2	Moncongloe	519
3	Maros Baru	532
4	Marusu	653
5	Turikalle	1.636
6	Lau	375
7	Bontoa	329
8	Bantimurung	190
9	Simbang	244
10	Tanralili	352
11	Tompobulu	56
12	Camba	98
13	Cenrana	80
14	Malawa	55
	Maros	443

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2022

B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Administrasi dan Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Bantimurung berada di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, Kecamatan Bantimurung merupakan daerah bukan pantai yang sebagian besar bentuk dataran. Dari delapan daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan bantimurung satu dari 14

Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Adapun batas administrasi dapat berbatasan langsung dengan:

- Sebelaha Utara : Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan : Kecamatan Simbang
- Sebelah Barat : Kecamatan Turikale dan Kecamatan Lau
- Sebelah Timur : Kecamatan Cenrana

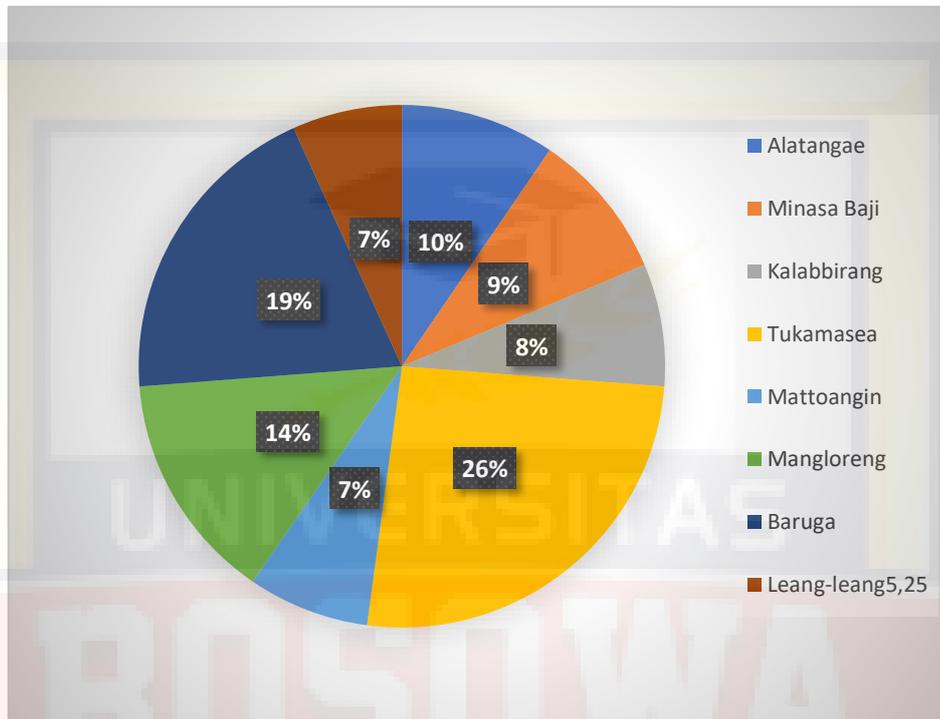
Berikut dibawah ini merupakan luas wilayah dari kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Bantimurung **tabel 4.9** :

Tabel 4.9 Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)
1.	Alatangae	7.39
2.	Minasa Baji	7.13
3.	Kalabbirang	5.89
4.	Tukamasea	20.14
5.	Mattoangin	5.81
6.	Mangloreng	11.03
7.	Baruga	15.16
8.	Leang - leang	5.25

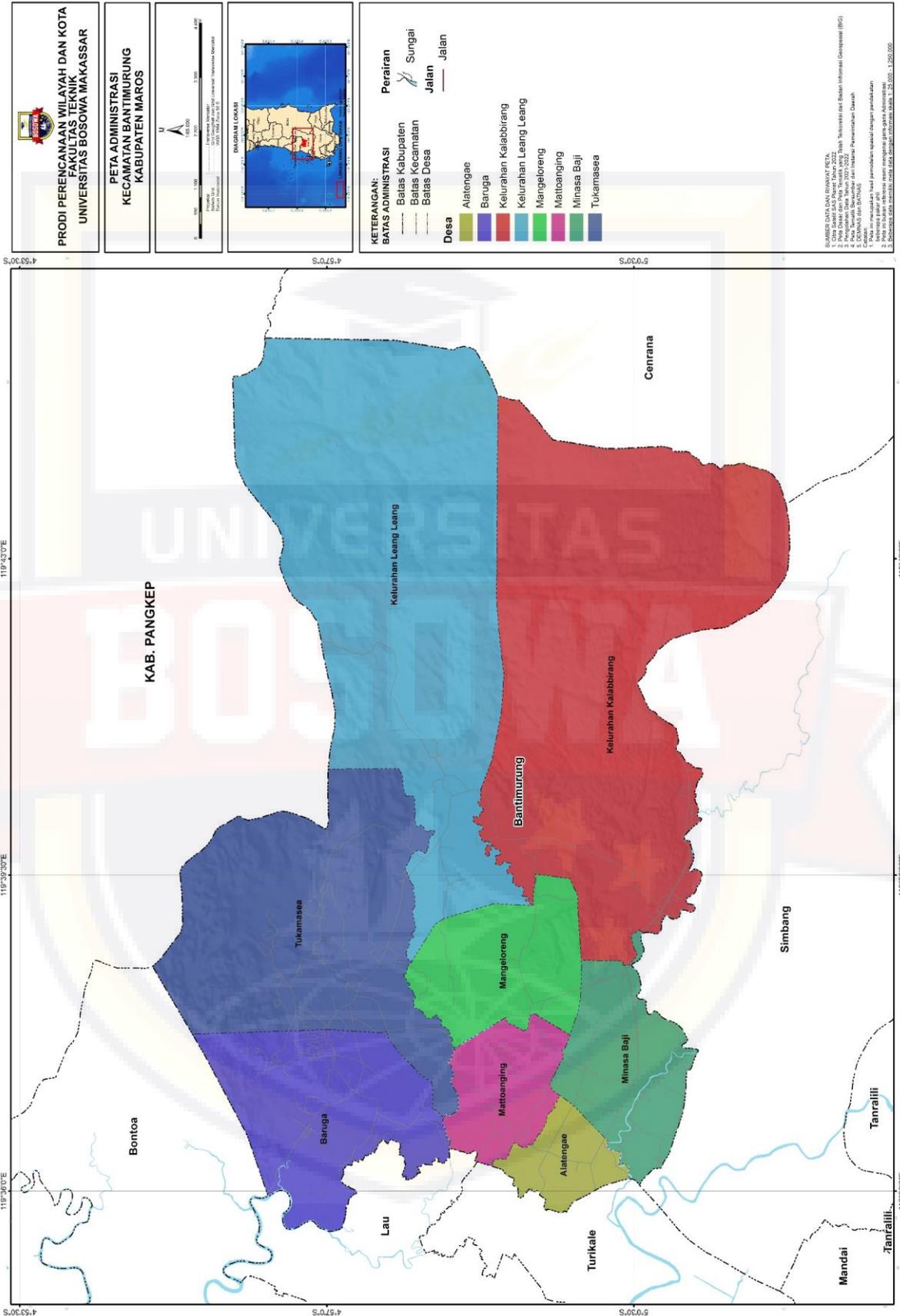
Sumber : BPS Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2021

Diagram 4.2 Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020



Sumber : BPS Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2021

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Bantimurung, Desa atau kelurahan yang terluas berada di Tukamasea dengan luas wilayah 20.14 km², kemudian untuk Kelurahan/Desa yang luasannya terkecil yaitu berada di Desa Leang-Leang dengan luas wilayah 5.25 Km². Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.6** berikut :



Gambar 4.6 Peta Administrasi Kecamatan Bantimurung

2. Kondisi Fisik Wilayah

1) Topografi

Menurut Suparno dan Endy (2005), keadaan topografi adalah keadaan yang menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan, semakin besar kontur lahan berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin besar.

Garis kontur memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu:

1. Garis kontur selalu bersifat horizontal, tidak bercabang, dan tidak berpotongan
2. Garis kontur yang rapat menunjukkan kemiringan lereng curam, sedangkan kontur yang renggang menunjukkan kemiringan lereng landai.
3. Garis kontur yang bertanda huruf U selalu menunjukkan punggung pegunungan atau gunung; dan
4. Garis kontur yang bertanda huruf V selalu menandakan suatu lembah atau jurang.
5. Garis kontur berbentuk kurva tertutup.

Adapun Kecamatan Bantimurung mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut.

(gambar 4.7).

2) Morfologi

Morfologi merupakan kenampakan fisik kawasan yang ditinjau dari struktur yang membentuk bentuk kenampakan tertentu. Kenampakan fisik morfologi bukan hanya bentuk melainkan adanya hubungan antar kawasan (Dahal, Benner, & Lindquist, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar **gambar 4.8**.

3) Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng (*slope*) menunjukkan besarnya sudut yang terbentuk dari perbedaan ketinggian pada sebuah bentang alam, yang biasanya disajikan dalam satuan persentase atau derajat. Adapun kemiringan lereng di Kecamatan Bantimurung dominan Curam yaitu dengan kemiringan kurang lebih 40%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **gambar 4.9**.

4) Curah Hujan

Curah hujan tahunan rata – rata 2000-2500 mm/thn dan Sebagian 2500-3000 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Daerah Kecamatan bantimurung pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim, berdasarkan curah hujan yakni :

- Musim hujan pada periode bulan Oktober sampai Maret
- Musim kemarau pada bulan April sampai September

Beberapa desa di Kecamatan bantimurung mempunyai iklim seperti daerah bagian timur Sulawesi Selatan yakni musim hujan pada

periode bulan April sampai September dan musim kemarau dalam bulan Oktober sampai Maret. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar 4.10;

5) Jenis Tanah

Secara umum, tanah merupakan berfungsi sebagai penyimpanan air dan nutrisi, sebagai media penyaring dan pengurai limbah yang merugikan kehidupan, dan sebagai lapisan yang turut serta dalam perputaran karbon dan elemen lain melalui ekosistem global. Tanah sebenarnya merupakan batuan yang telah lapuk dan mengalami proses pembentukan lebih lanjut. Umumnya, tanah dibentuk dari campuran bahan organik dan mineral atau nonorganik. Adapun di Kecamatan Bantimurung terdapat jenis tanah latosol, mediteran , dan alluvial.

Latosol adalah merupakan jenis tanah tua, yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Tanah ini memiliki ciri bersifat asam, kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang, memiliki warna merah hingga kuning, dan memiliki tekstur lempung. Tanah Latosol adalah jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah latosol ini cocok ditanami dengan jenis tanaman seperti padi, palawija, sayuran, karet, cengkeh dan kakao.

Mediteran atau tanah kapur ini adalah jenis tanah yang merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Ciri-ciri tanah kapur adalah berasal dari bebatuan kapur, miskin unsur hara, dan kurang subur. Jenis tanah mediteran merah kuning ini tersebar di daerah dengan iklim subhumid dengan topografi karts, Lereng vulkanik dengan ketinggian di bawah 400 M;

Alluvial merupakan Jenis tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah alluvial pada umumnya memberi hasil seperti produksi padi , produksi palawija dan juga bisa digunakan untuk usaha budidaya tambak perikanan. Untuk lebih jelasnya auraian diatas dapat dilihat pada **gambar 4.11** .

6) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan perkembangnya tuntutan hidup yang

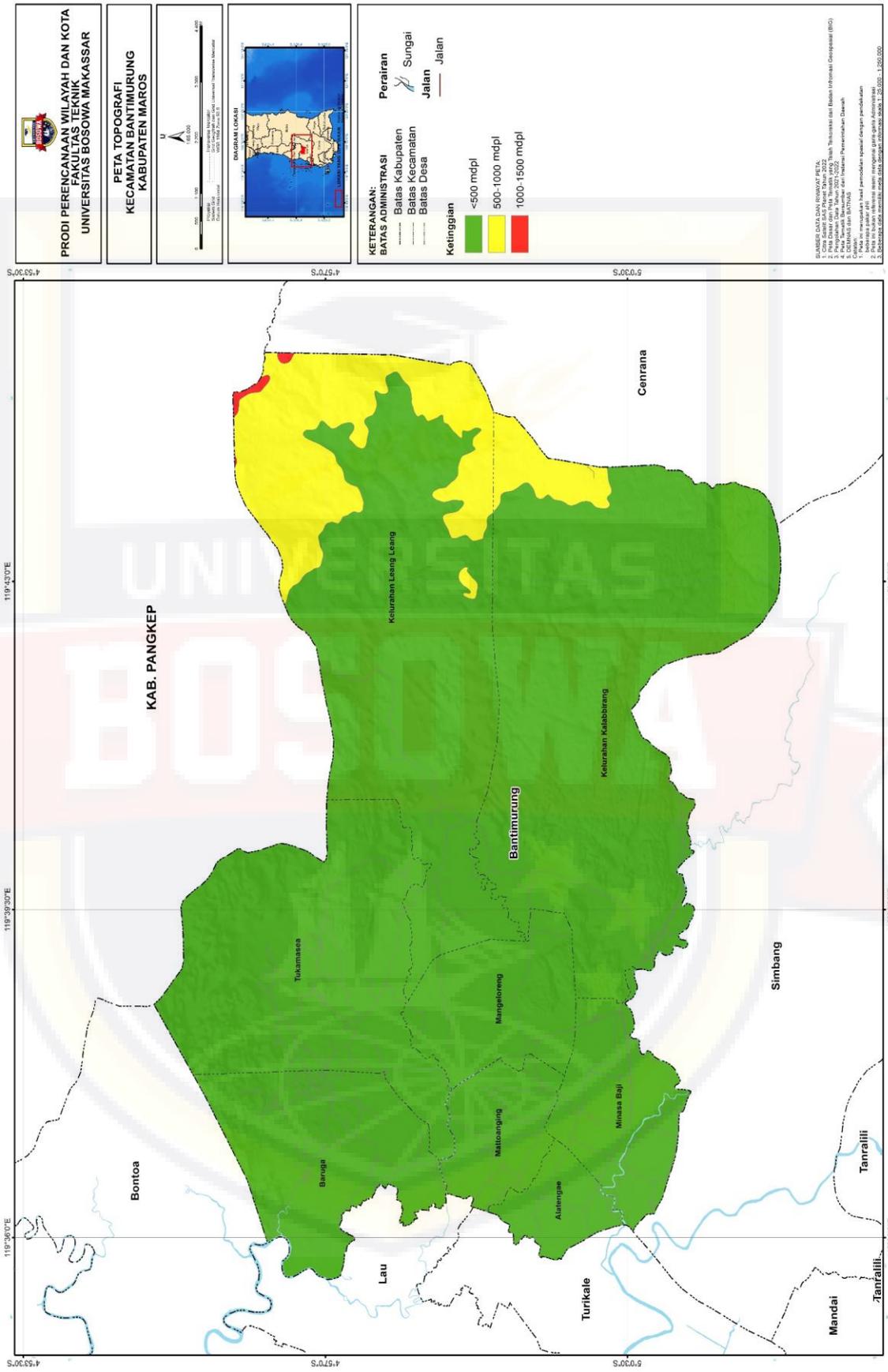
akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat.. Penggunaan lahan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada

tabel berikut:

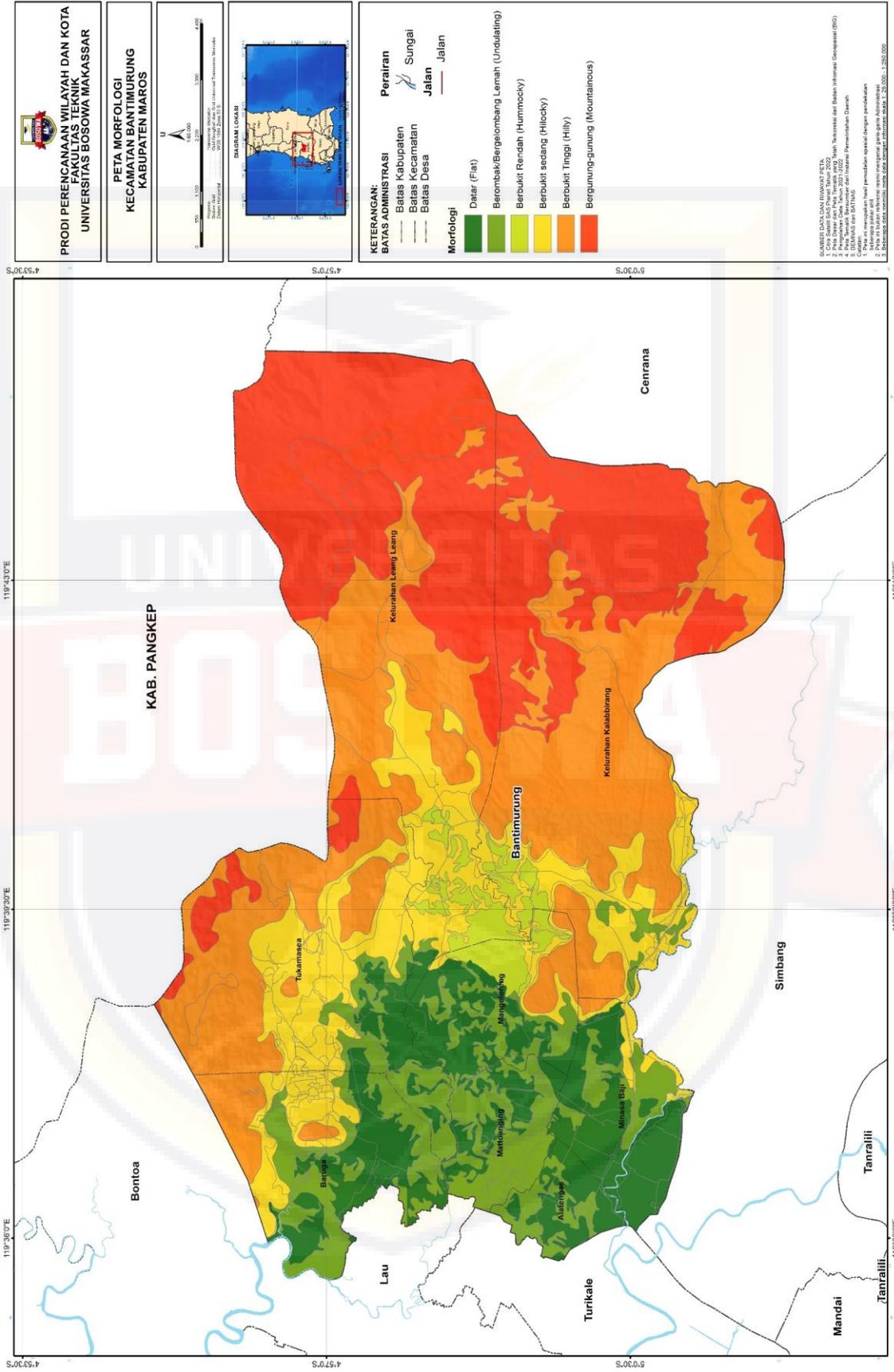
**Tabel 4.10 Luas Penggunaan Lahan
di Kecamatan Bantimurung Tahun 2021**

Tutupan Lahan	Luas (Ha)
Danau/Situ	4,34
Hutan Rimba	9260,13
Perkebunan/Kebun	149,13
Permukiman	476,98
Sawah	4175,81
Semak Belukar	227,60
Sungai	26,30
Tambak	165,85
Tanah Kosong/Gundul	197,67
Tegalan/Ladang	513,41
Tempat Kegiatan	99,65
Jumlah	15296,87

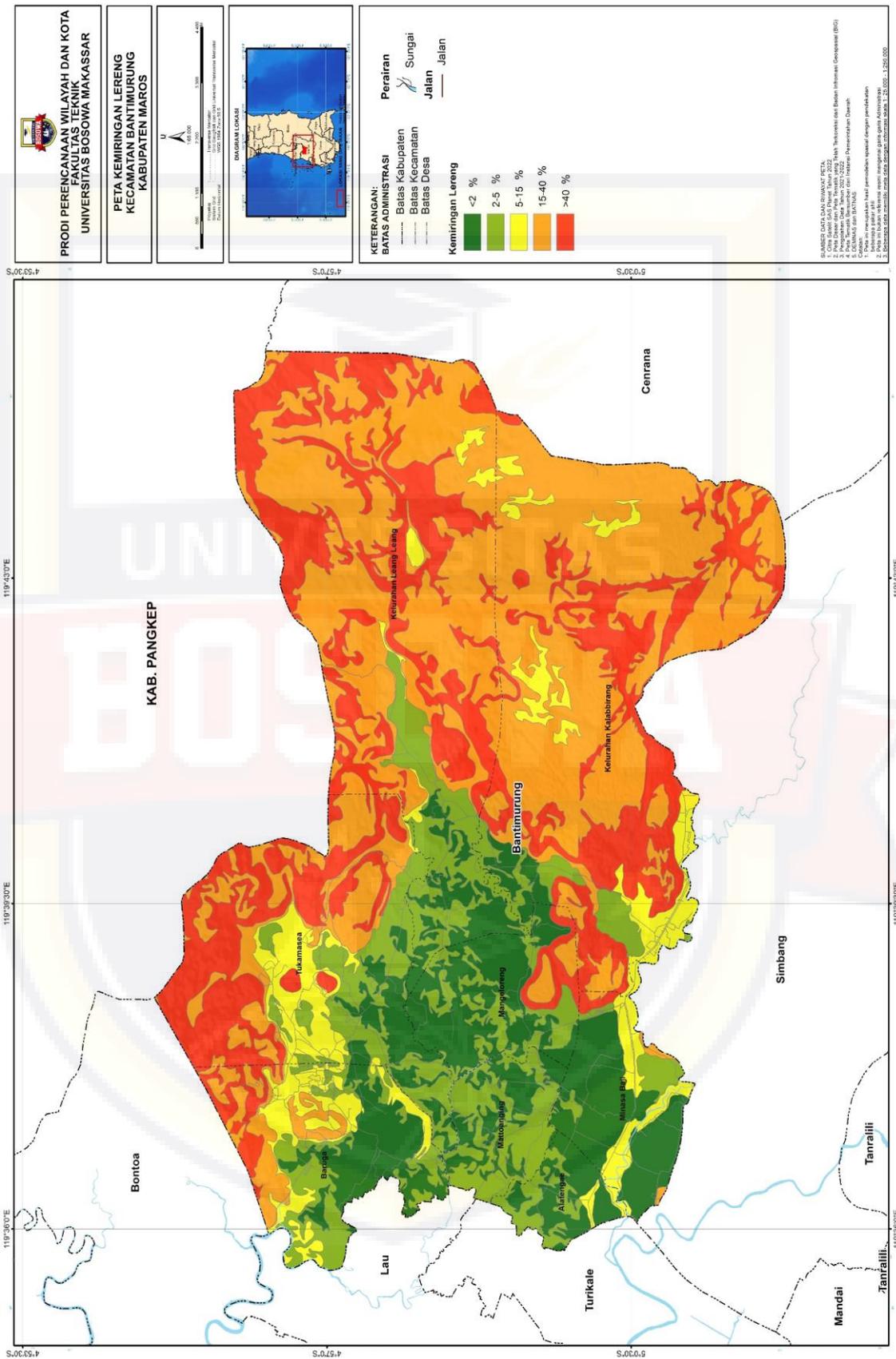
Sumber : RTRW Kabupaten Maros



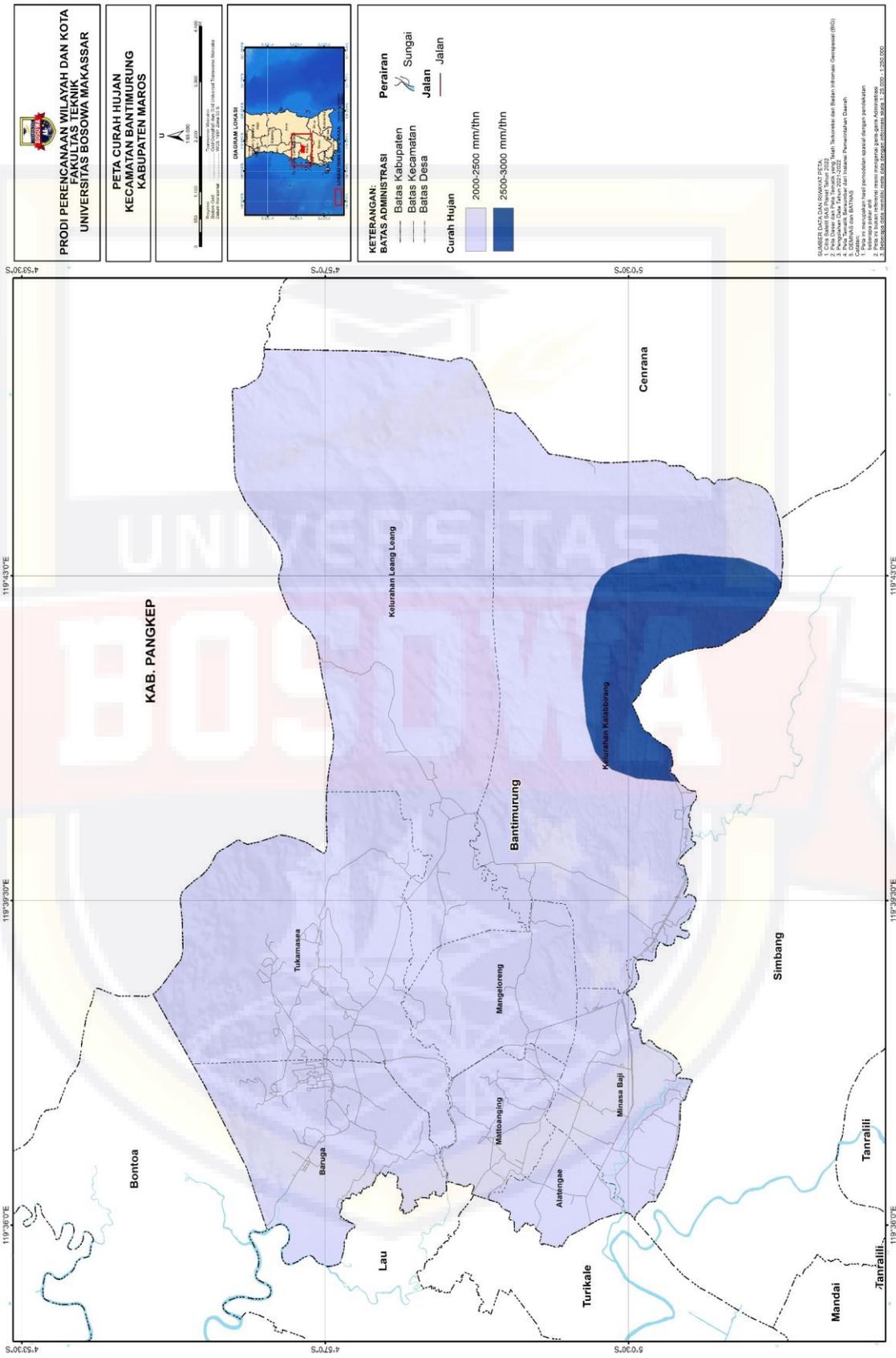
Gambar 4.7 Peta Topografi Kecamatan Bantimurung



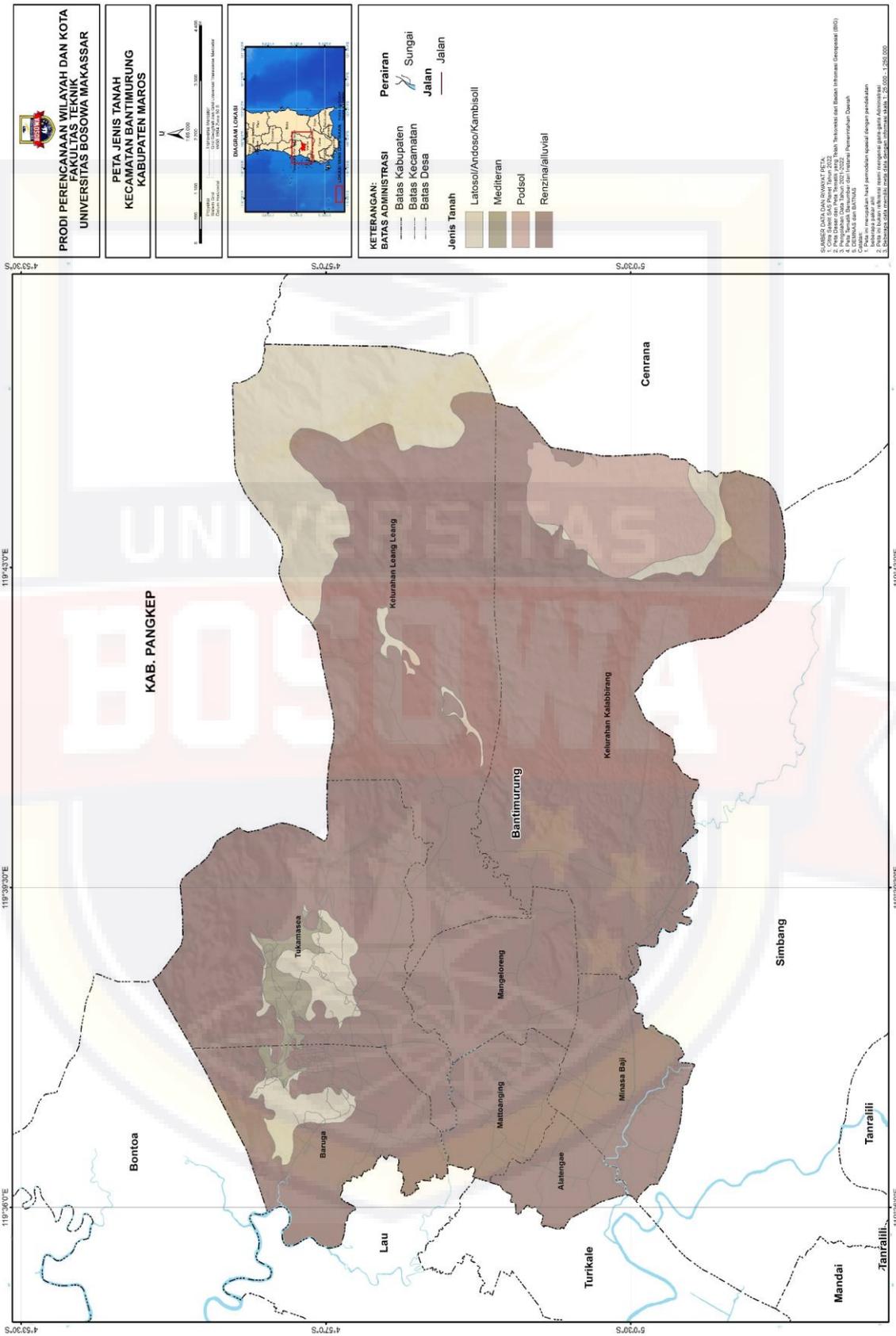
Gambar 4.8 Peta Morfologi Kecamatan Bantimurung



Gambar 4.9 Peta Kemiringan lereng Kecamatan Bantimurung



Gambar 4.10 Peta Curah Hujan Kecamatan Bantimurung



Gambar 4.11 Peta jenis Tanah Kecamatan Bantimurung

3. Demografi

1) Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kecamatan Bantimurung dalam angka tahun 2021, penduduk Kecamatan Bantimurung pada Tahun 2020 sebanyak 32.835 jiwa, dan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Alatengae dengan jumlah penduduk 5.241 jiwa serta jumlah yang paling kecil berada di Kelurahan Leang-Leang yaitu 2.495 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **tabel 4.11** berikut:

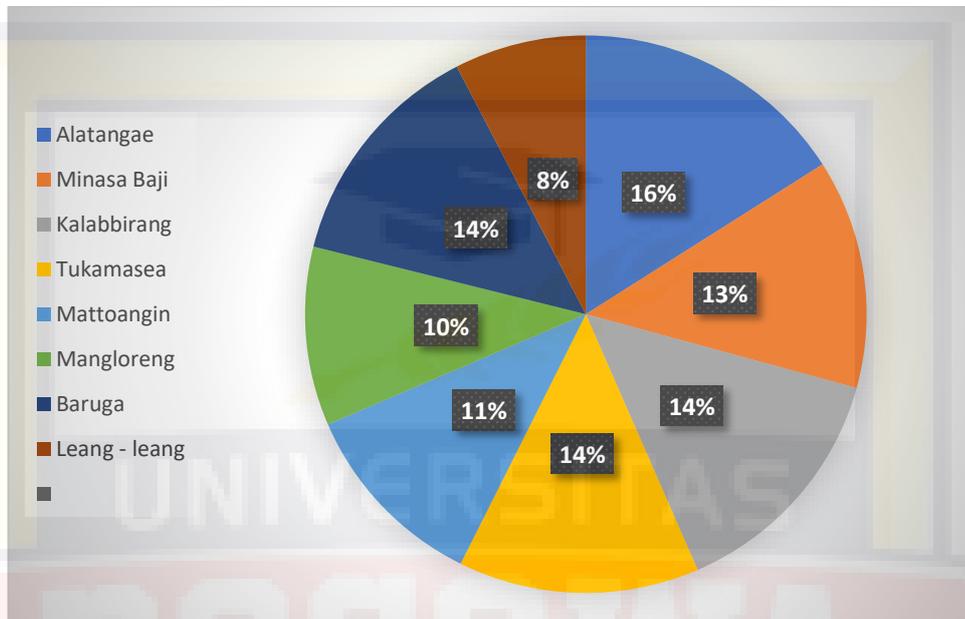
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bantimurung tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Penduduk (jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Alatangae	5.241	7.39	709
2.	Minasa Baji	4.368	7.13	613
3.	Kalabbirang	4.667	5.89	792
4.	Tukamasea	4.557	20.14	226
5.	Mattoangin	3.669	5.81	631
6.	Mangloreng	3.405	11.03	309
7.	Baruga	4.433	15.16	292
8.	Leang - leang	2.495	5.25	48
Jumlah		32.835	77.80	422

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

Diagram 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

2) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Data rasio jenis kelamin ini, berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah Penduduk yang berjenis kelamin Laki – Laki pada Kecamatan Bantimurung sebanyak 16.345 jiwa. Dan untuk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.480 jiwa . Berikut ini adalah

jumlah penduduk Kecamatan Bantimurung berdasarkan jenis kelamin, dan Rasio jenis kelamin per Kelurahan di Kecamatan Bantimurung 2020 untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kelurahan di Kecamatan Bantimurung Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio (%)
1.	Alatangae	2.612	2.629	5.241	99
2.	Minasa Baji	2.178	2.190	4.368	99
3.	Kalabbirang	2.327	2.340	4.467	99
4.	Tukamasea	2.277	2.270	4.547	100
5.	Mattoangin	1.801	1.868	3.669	96
6.	Mangloreng	1.689	1.716	3.405	98
7.	Baruga	2.230	2.230	4.433	101
8.	Leang - leang	1.231	1.264	2.495	97
Jumlah		16.345	16.480	32.835	99

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin Laki – Laki pada Kecamatan Bantimurung sebanyak 16.345 jiwa . Dan untuk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.480 jiwa dengan jumlah keseluruhan 32.835 jiwa dengan jumlah sex rasio 99%.

4. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Secara umum pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Tabel 4.13 Luas Lahan Baku Sawah

Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantimurung

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
Alatengae	291,31
Baruga	426,73
Kelurahan Kalabbirang	308,03
Kelurahan Leang Leang	442,51
Mangeloreng	596,32
Mattoanging	450,30
Minasa Baji	609,86
Tukamasea	461,84
Total	3586,91

Sumber : Data LBS Provinsi Sulawesi Selatan

Dari data LBS Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel diatas dapat di uraikan bahwa luas lahan baku sawah terluas berada di Kelurahan/Desa Minasa Baji dengan luas 609,84 Ha. Dan luas

lahan baku sawah yang paling kecil berada pada Kelurahan/Desa
Alatengae dengan luas wilayah 291,31 Ha.

C. Kesesuaian Lahan Pertanian

1. Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan diperoleh dari menghitung satuan kemampuan lahan dilanjutkan dengan overlay menjadi peta kemampuan lahan.

1) SKL Morfologi

SKL morfologi bertujuan melakukan pemilahan dan mengetahui potensi kendala masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap morfologi. Adapun Adapun SKL Morfologi pada Kecamatan Bantimurung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 SKL Morfologi Kecamatan Bantimurung

No.	SKL Morfologi	Luas (Ha)	%
1.	Kemampuan Lahan Morfologi Tinggi	3587,02	23
2.	Kemampuan Lahan Morfologi Sedang	1293,79	8
3.	Kemampuan Lahan Morfologi Rendah	1240,97	8
4.	Kemampuan Lahan Morfologi Kurang	7937,43	52

5.	Kemampuan Lahan Morfologi Cukup	1293,79	8
Total		15296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa SKL Morfologi di Kecamatan Bantimurung terdiri dari Kemampuan Lahan Morfologi Tinggi dengan luas 3587,02 Ha. Sedangkan untuk Kemampuan Lahan Morfologi yang cukup seluas 1293,79 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 4.13 :

2) SKL Kemudahan Dikerjakan

SKL Kemudahan dikerjakan bertujuan untuk memperoleh gambaran guna mengetahui tingkat kemudahan lahan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan. Adapun SKL Kemudahan dikerjakan pada kawasan perencanaan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.15 SKL Kemudahan Dikerjakan
Kecamatan Bantimurung**

No.	SKL Kemudahan Dikerjakan	Luas (Ha)	%
1.	Kemudahan Dikerjakan Tinggi	12.850,12	84
2.	Kemudahan Dikerjakan Sedang	2446,75	16
Total		15.296.87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang tertuang pada tabel di atas dapat di ketahui bahwa Luas pada SKL Kemudahan Dikerjakan dengan kemudahan di kerjakan tinggi yaitu seluas 12850,12 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.14** :

3) SKL Kestabilan Lereng

SKL Kestabilan Lereng bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kestabilan lereng untuk pembangunan wilayah, daerah yang berlereng cukup aman untuk dikembangkan dan batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kestabilan lereng. Adapun SKL Kestabilan Lereng pada kawasan perencanaan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.16 SKL Kestabilan Lereng
Kecamatan Bantimurung**

No.	SKL Kestabilan Lereng	Luas (Ha)	%
1.	Kestabilan Lereng Tinggi	3587,02	23
2.	Kestabilan Lereng Cukup	1293,79	8
3.	Kestabilan Lereng Sedang	3782,78	25
4.	Kestabilan Lereng Kurang	6633,28	43
Total		15.296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada tabel di atas memperoleh hasil dari SKL Kestabilan Lereng di

Kecamatan Bantimurung pada Kestabilan Lereng Tinggi yaitu seluas 3587,02 Ha, sedangkan pada kestabilan lereng kurang seluas 6633,28 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 4.15 :

4) SKL Kestabilan Pondasi

SKL Kestabilan Pondasi bertujuan untuk memperoleh gambaran daya dukung tanah dan perkiraan jenis pondasi dari masing-masing tingkat kestabilan pondasi. (tambahi dikit narasi). Adapun kestabilan pondasi yang ada di Kecamatan bantimurung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17 SKL Kestabilan Pondasi
Kecamatan Bantimurung**

No.	SKL Kestabilan Pondasi	Luas (Ha)	%
1.	Kestabilan Pondasi Tinggi	3930,07	13
2.	Kestabilan Pondasi Sedang	8217,03	54
3.	Kestabilan Pondasi Cukup	1931,43	13
4.	Kestabilan Pondasi Kurang	1218,04	8
Total		15296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti adapun SKL Kestabilan Pondasi di Kecamatan Bantimurung menghasilkan pada kestabilan pondasi tinggi seluas 3930,07 Ha sedangkan pada kestabilan pondasi kurang seluas

1218,04 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.16**.

5) SKL Ketersediaan Air

SKL Ketersediaan Air bertujuan untuk mengetahui kapasitas air, sumber-sumber air dan memperoleh gambaran penyediaan air untuk tingkat ketersediaan air.

**Tabel 4.18 SKL Ketersediaan Air
Kecamatan Bantimurung**

No.	SKL Ketersediaan air	Luas (Ha)	%
1.	Ketersediaan Air Tinggi	3759,71	25
2.	Ketersediaan Air Sedang	1919,76	13
3.	Ketersediaan Air rendah	5048,18	33
4.	Ketersediaan Air sangat rendah	4569,22	30
Total		15296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti pada tabel diatas dapat dilihat bahwa SKL Ketersediaan Air Kecamatan Bantimurung terdiri dari ketersediaan air tinggi seluas 3759,71 Ha dan pada ketersediaan air sangat rendah seluas 4569,22 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.17**.

6) SKL Untuk Drainase

SKL untuk Drainase bertujuan untuk memperoleh gambaran karakteristik drainase alamiah masing-masing tingkat

kemampuan drainase dan cenderung tergenang di musim penghujan. Adapun SKL untuk Drainase dikawasan perencanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.19 SKL Untuk Drainase Kecamatan Bantimurung

No.	SKL Drainase	Luas (Ha)	%
1.	Kemampuan Drainase Cukup	15296,87	100
Total		15296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti menghasilkan SKL untuk drainase Kecamatan Bantimurung seluas 15296,87 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 4.18

7) SKL Terhadap Erosi

SKL Terhadap Erosi bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya terhadap daerah yang lebih hilir. Untuk SKL terhadap erosi pada lokasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 SKL Terhadap Erosi Kecamatan Bantimurung

No.	SKL Morfologi	Luas (Ha)	%
1.	Tingkat Ketahanan Tinggi	9487,77	62

1.	Tingkat Ketahanan Cukup	3889,56	25
2.	Tingkat Ketahanan Kurang	1919,53	13
Total		15296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel diatas menghasilkan SKL terhadap erosi di Kecamatan Bantimurung yaitu pada tingkat ketahanan tinggi seluas 9487,77 Ha sedangkan pada tingkat ketahanan kurang seluas 1919,53 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.19**

8) SKL Terhadap Bencana

SKL Terhadap Bencana bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana.

**Tabel 4.21 SKL Terhadap Bencana
Kecamatan Bantimurung**

No.	SKL Terhadap Bencana	Luas (Ha)	%
1.	Kelas Rawan Tinggi	4295,73	28
2.	Kelas Rawan Kurang	5397,85	35
3.	Kelas Rawan Cukup	5603,29	37
Total		15.296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel diatas menghasilkan SKL terhadap bencana di Kecamatan bantimurung yaitu pada kelas rawan tinggi seluas 4295,73 Ha sedangkan kelas rawan cukup 5603,29 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.20**.

9) Analisis Kemampuan Lahan

Kemampuan penggunaan lahan adalah suatu sistematika dari berbagai penggunaan lahan berdasarkan sifat-sifat yang menentukan potensi lahan untuk berproduksi secara lestari. Lahan diklasifikasikan atas dasar penghambat fisik. Sistem klasifikasi ini membagi lahan menurut factor-faktor penghambat serta potensi bahaya lain yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi, hasil klasifikasi ini dapat digunakan untuk menentukan arahan penggunaan lahan secara umum (misalnya untuk budidaya tanaman semusim, perkebunan, hutan produksi dsb). Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia

dan makhluk hidup lain. Adapun hasil analisis kemampuan lahan Kecamatan Bantimurung adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.22 Analisis Kemampuan Lahan
Kecamatan Bantimurung**

No.	Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	12927,52	13
2.	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	2890,08	19
3.	Kemampuan Pengembangan Sedang	1457,77	10
4.	Kemampuan Pengembangan Rendah	8391,48	55
5.	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	630,02	4
Total		15.296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

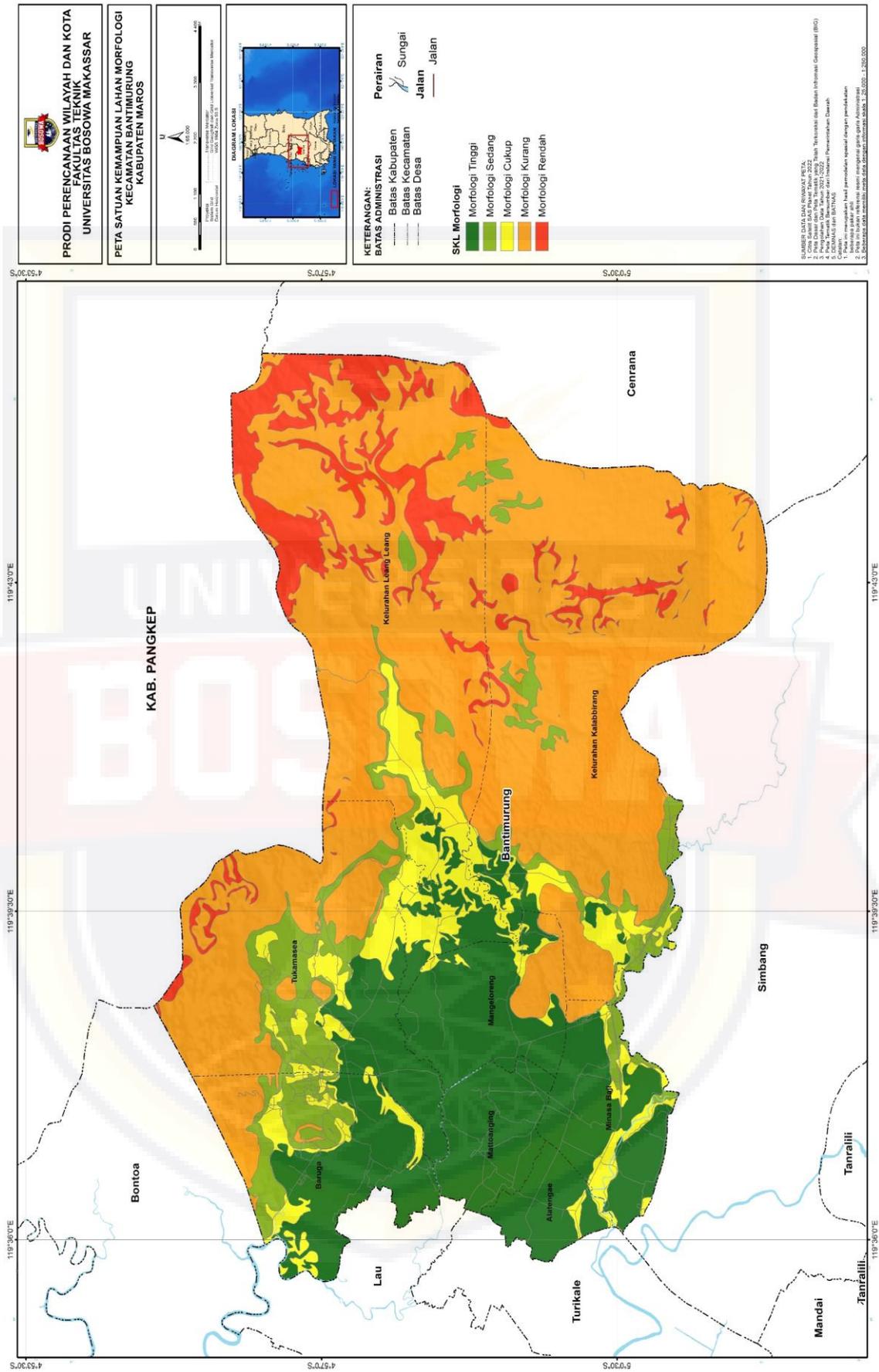
Adapun hasil dari kemampuan lahan untuk menunjang analisis kemampuan lahan pertanian di lokasi penelitian:

- a) Kemampuan pengembangan sangat tinggi pada lokasi penelitian memiliki luas 12.927,52 Ha dengan dominasi penggunaan lahan sawah, permukiman, tegalan ladang , perkebunan, serta badan air.
- b) Kemampuan pengembangan agak tinggi pada lokasi penelitian memiliki luas 2890,08 Ha dengan dominasi penggunaan lahan sawah, tanah kosong, tempat

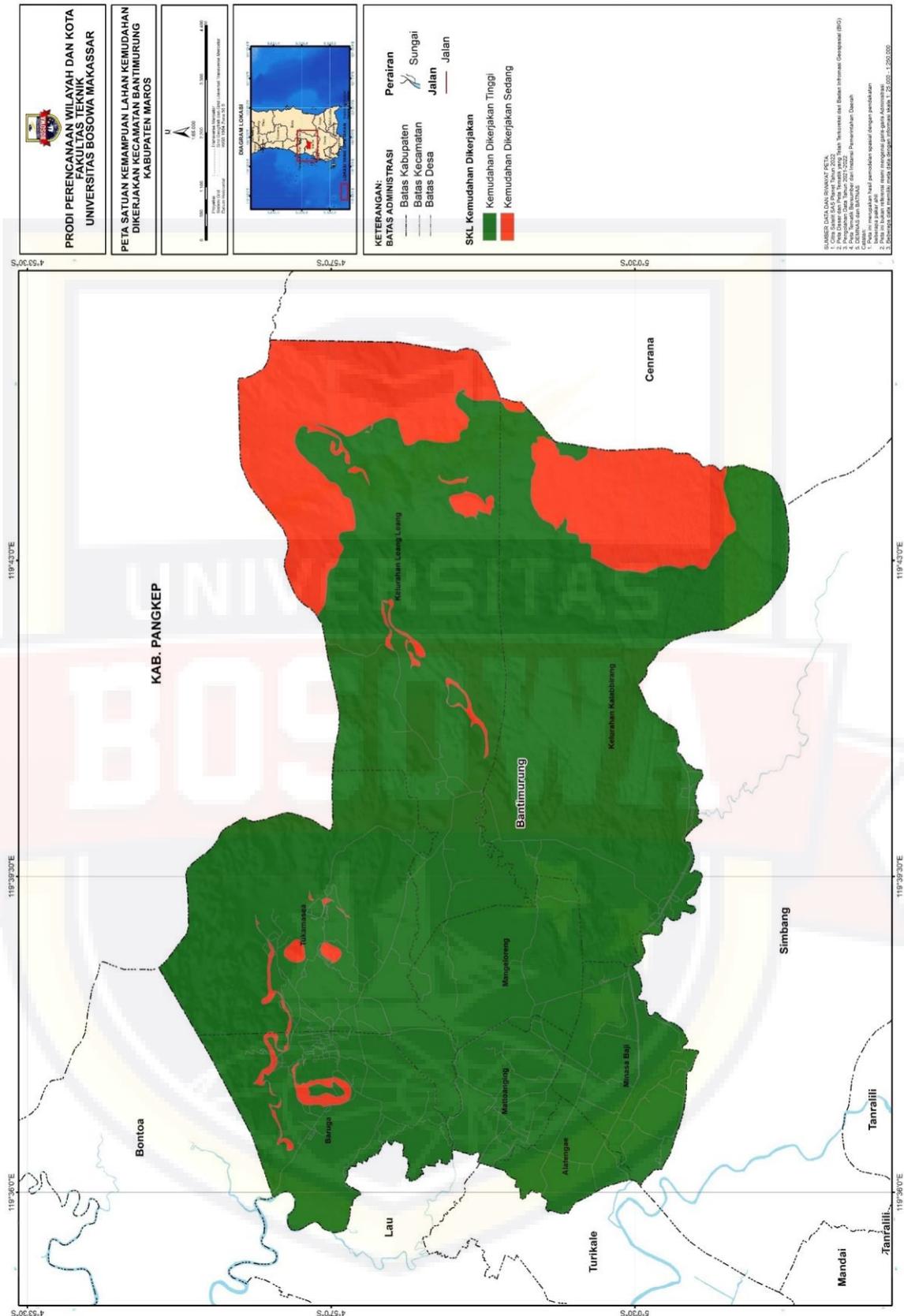
kegiatan , tegalan ladang, semak belukar, permukiman , kebun, dan danau.

- c) Kemampuan pengembangan sedang pada lokasi penelitian memiliki luas 1457,77 ha di dominasi oleh penggunaan lahan permukiman, sawah, perkebunan, tambak, dan semak belukar.
- d) Kemampuan pengembangan rendah pada lokasi penelitian memiliki luas 8391,48 Ha di dominasi oleh penggunaan lahan semak belukar, tanah kosong, dan tegalan ladang.
- e) Kemampuan pengembangan sangat rendah pada lokasi penelitian memiliki luas 630,02 Ha yang didominasi oleh penggunaan lahan yaitu hutan rimba.

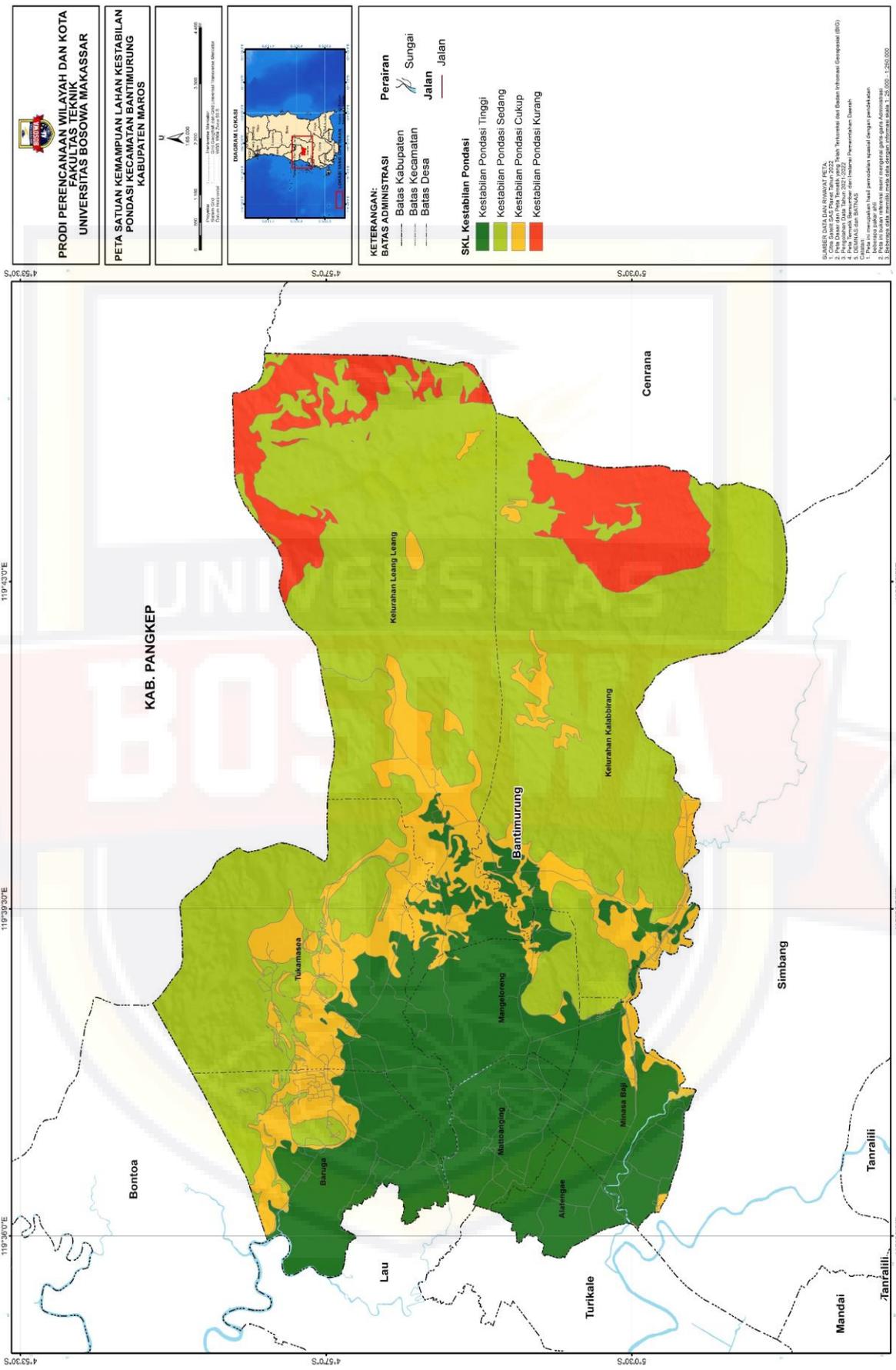
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.21**



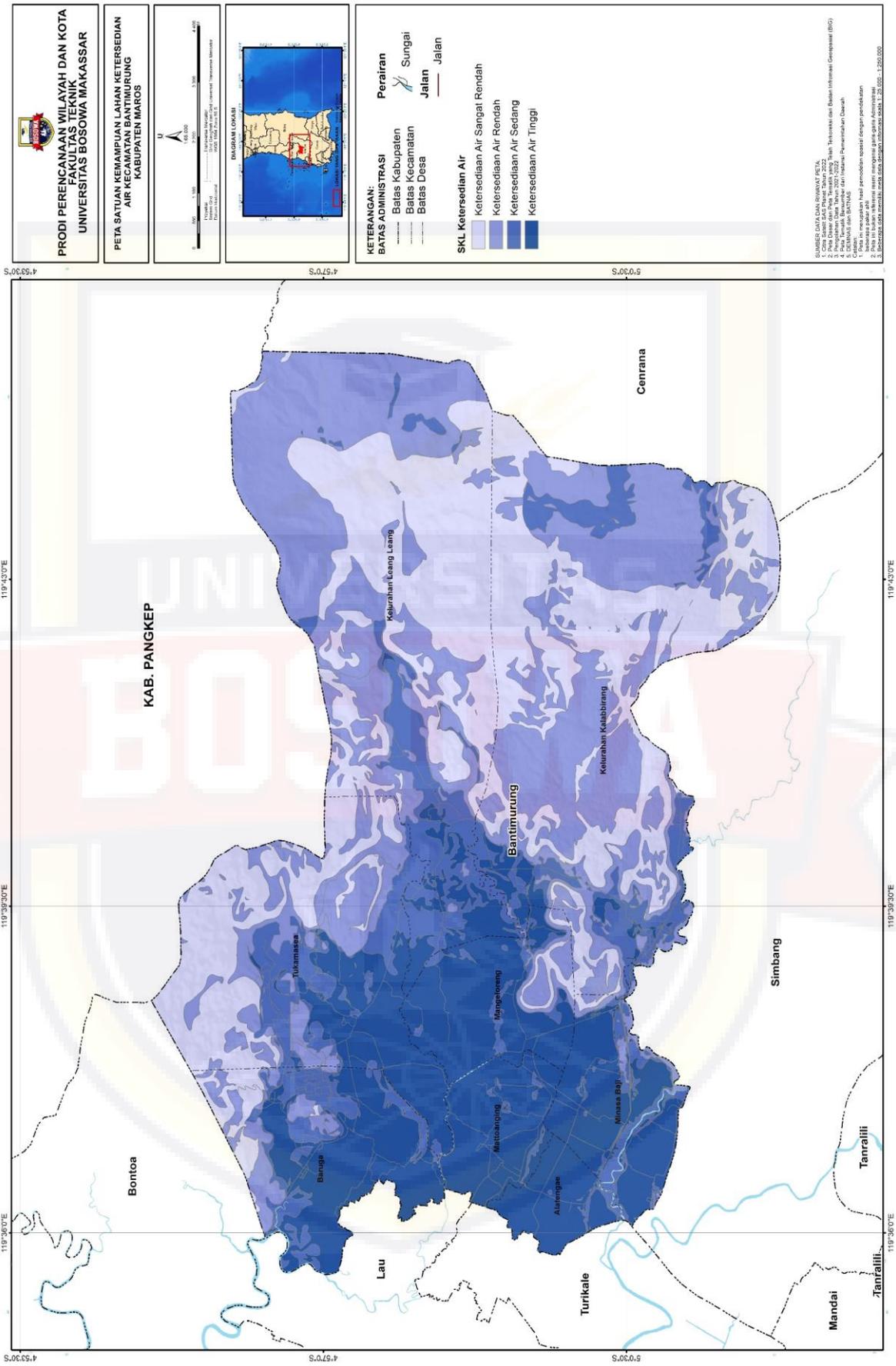
Gambar 4.13 SKL Morfologi Kecamatan Bantimurung



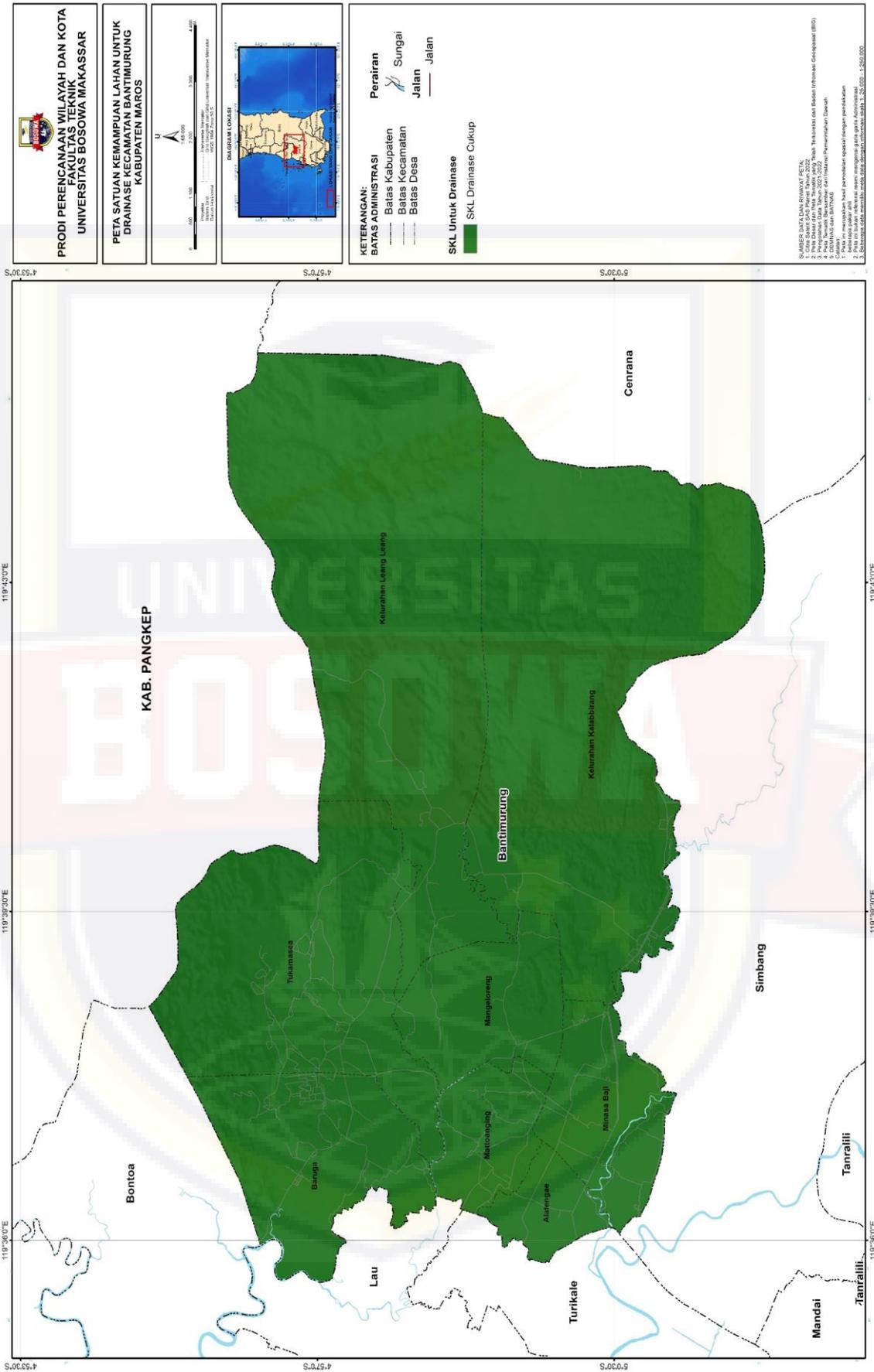
Gambar 4.14 Peta SKL Kemudahan Di Kerjakan Kecamatan Bantimurung



Gambar 4.16 Peta SKL Kestabilan Pondasi Kecamatan Bantimurung



Gambar 4.17 Peta SKL Ketersediaan Air Kecamatan Bantimurung



Gambar 4.18 Peta SKL Untuk Drainase Kecamatan Bantimurung

2. Kesesuaian Lahan Pertanian

Analisis kesesuaian lahan merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis kemampuan dimana memberikan arahan rekomendasi guna mengembangkan suatu daerah. Arahan tata ruang pertanian bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahannya. Adapun data yang dibutuhkan ialah peta kemampuan lahan yang keluarannya akan menghasilkan peta arahan tata ruang pertanian.

Hasil dari analisis kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung menghasilkan 4 kelas yang terdiri dari Kawasan Lindung dengan luas keseluruhan 630,02 Ha, Kawasan penyangga dengan total luasan 8391,48 Ha, menyusul Kawasan Tanaman tahunan seluas 4817,60 Ha, dan Kawasan Tanaman Semusim seluas 1457,77 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23 Arahannya Pengembangan Lahan Pertanian Kecamatan
Bantimurung (Ha)**

No.	Kelurahan/ Desa	Kawasan Penyangga	Lindung	Tanaman Setahun	Tanaman Tahunan
1.	Alatengae	-	-	337,87	-
2.	Baruga	204,27	-	858,33	250,54
3.	Kelurahan Kalabbirang	3754,06	9,67	297,94	439,87
4.	Kelurahan Leang Leang	2979,36	620,35	627,27	213,94
5.	Mangeloren g	143,23	-	723,62	3,18
6.	Mattoanging	-	-	547,48	
7.	Minasa Baji	25,15	-	735,49	70,95
8.	Tukamasea	1285,40	-	689,59	479,28
Jumlah		8391,48	630,02	4817,60	1457,77

Sumber: Hasil Analisis Arahannya Tata Ruang Pertanian

D. Konsep Pengendalian

1. Analisis Kebijakan

a. Kebijakan Arahkan Pertanian Dalam RTRW

Dalam Kebijakan Perda dalam RTRW Kabupaten Maros tahun 2012-2032 terdapat beberapa kebijakan Penataan Ruang Kabupaten maros yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi Kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industry dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman serta mendukung KSN perkotaan Mamminasata.

- 1) Pada pasal 7, yaitu peningkatan sumber daya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- 2) Pada pasal 8
 - Nomor 2, yaitu mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
 - Nomor 5 bagian a, mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan; bagian b, meningkatkan

kualitas lahan pertanian hortikultura terutama di daerah perbukitan dataran tinggi.

- Nomor 8 bagian b, mengembangkan Kawasan industri terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Nomor 9 bagian c, mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan Kawasan industri; bagian f, mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan Kawasan industri.

b. Kebijakan KP2B

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-

pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada PP 1 Tahun 2011 penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan

- Pasal 35 bagian 1, lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Bagian 2, Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
- Pasal 36 bagian 1, alih fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud yaitu terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a) Jalan umum;
 - b) Waduk;
 - c) Bendungan;

- d) Irigasi;
- e) Saluran air minum atau air bersih;
- f) Drainase dan sanitasi;
- g) Bangunan pengairan;
- h) Pelabuhan;
- i) Bandar udara;
- j) Stasiun dan jalan kereta api;
- k) Terminal;
- l) Fasilitas keselamatan umum;
- m) Cagar alam; dan/atau;
- n) Pembangkit dan jaringan listrik.

Bagian 2, selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Bagian 3, rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Maros ialah seluas 22.759,67 Ha. Adapun luas KP2B yang memiliki luas yang paling besar ialah Kecamatan Bantimurung dengan luasan 3.326,60 Ha

dan Kecamatan Moncongloe dengan luasan terendah sebesar 684,22 Ha.

Tabel 4.24 Luas KP2B Kabupaten Maros

Kecamatan	Luas
Bantimurung	3326,61
Bontoa	1027,14
Camba	1873,85
Cenrana	2299,92
Lau	1533,87
Mallawa	1379,81
Mandai	875,79
Maros Baru	1036,19
Marusu	740,27
Moncong Loe	684,23
Simbang	2522,01
Tanralili	2241,79
Tompobulu	2200,14
Turikale	1017,83
Total	22759,46

Sumber : KP2B Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Bantimurung memiliki potensi Pertanian yang tinggi. Adapun luasan KP2B menurut desa/kelurahan di Kecamatan Bantimurung dapat dilihat pada tabel berikut :

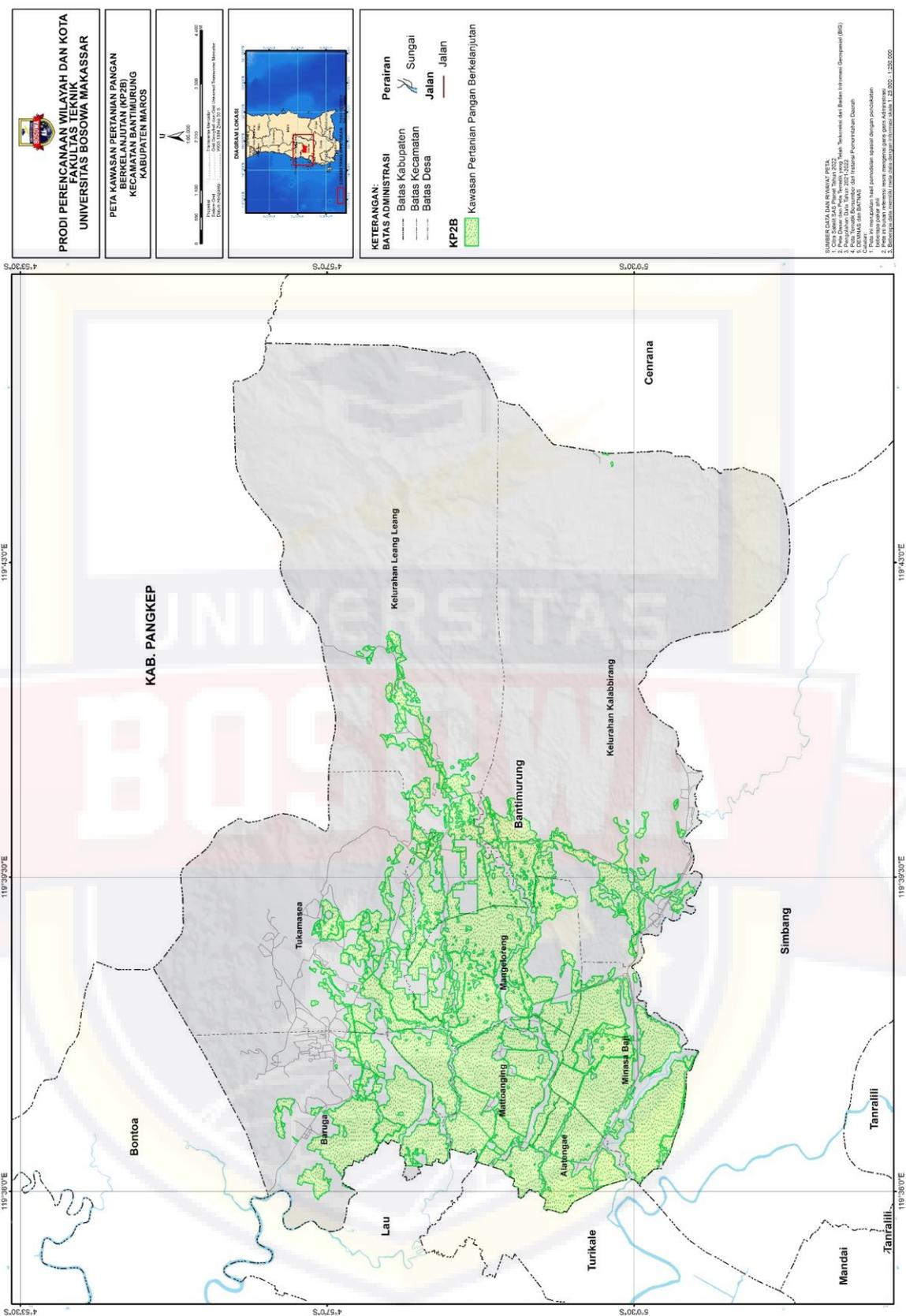
Tabel 4.25 Luasan KP2B Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantimurung

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
Alatengae	290,97
Baruga	402,19

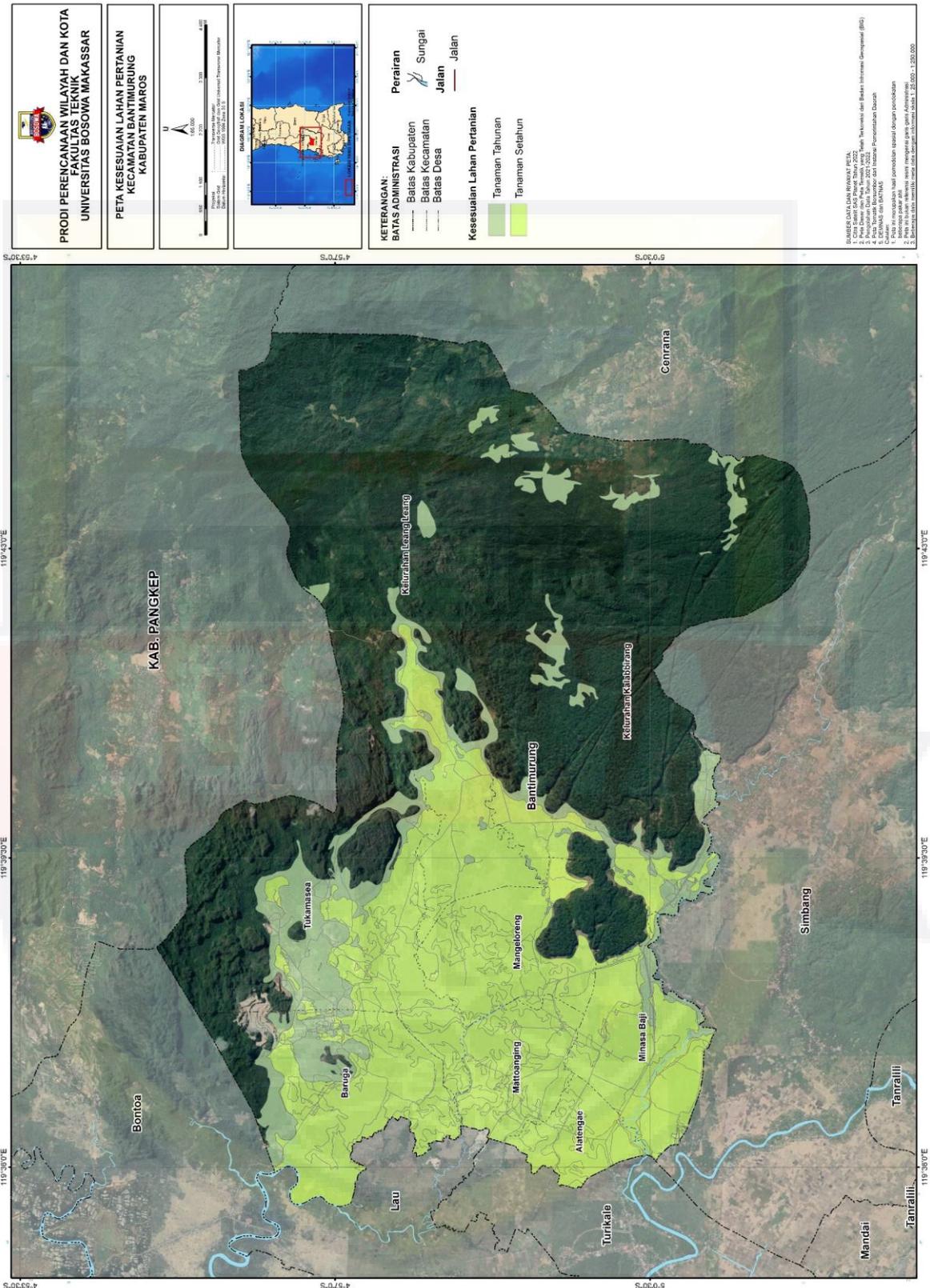
Kelurahan Kalabbirang	281,26
Kelurahan Leang Leang	322,98
Mangeloreng	563,81
Mattoanging	448,59
Minasa Baji	608,94
Tukamasea	407,86
Jumlah	3.326,60

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa/Kelurahan yang memiliki luasan KP2B terluas berada di Desa Minasa Baji seluas 608,94 Ha. Sedangkan untuk luasan KP2B yang paling kecil berada di Kelurahan Kallabbirang dengan luas 281,26 Ha. Untuk sebaran KP2B di Kecamatan Bantimurung lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.24** dibawah :



**Gambar 4.24 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kecamatan Bantimurung**



Gambar 4.25 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Kecamatan Bantimurung

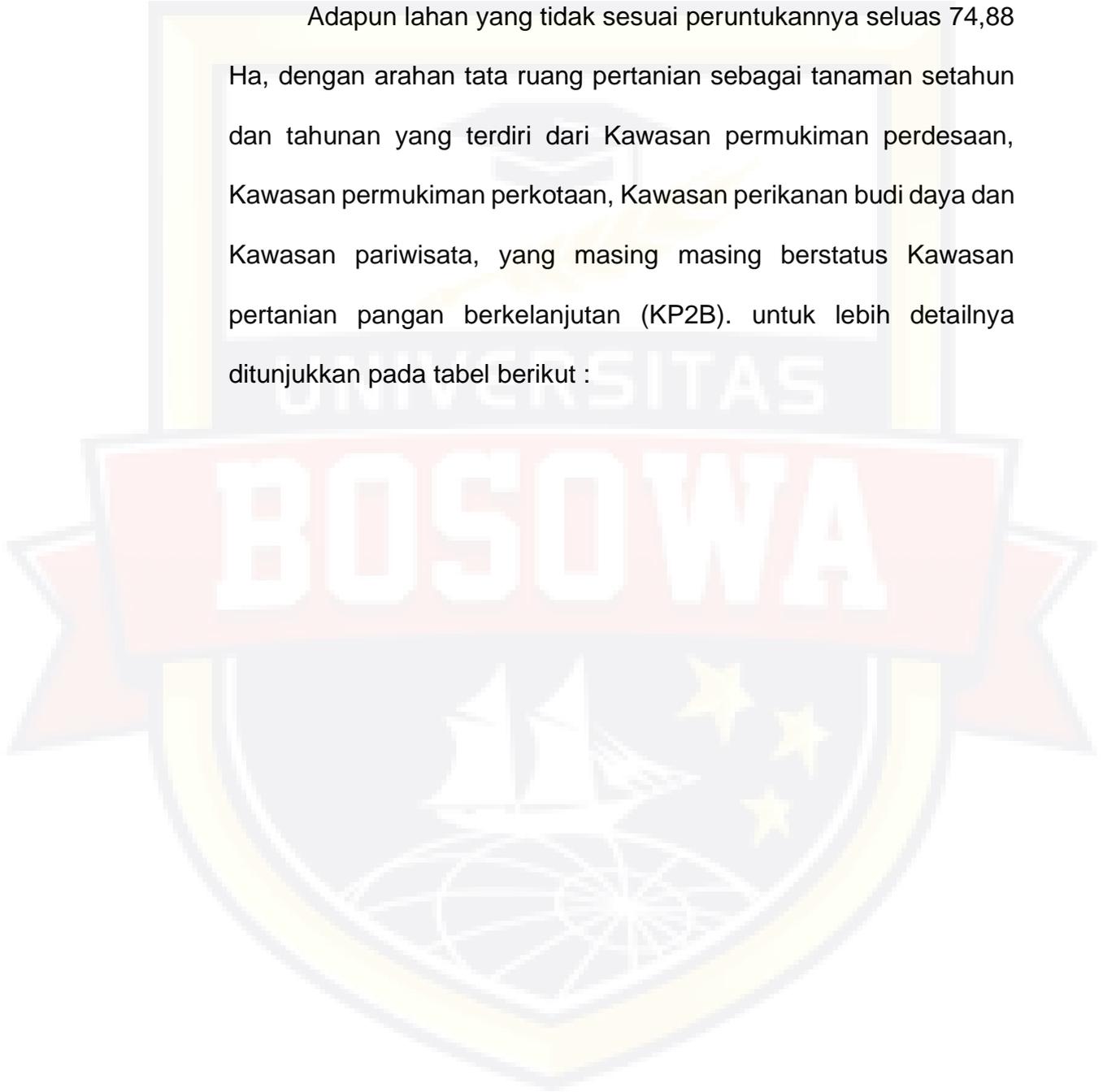
2. Analisis Kesesuaian antara tata ruang terhadap arahan pengembangan pertanian

Teknik yang dilakukan dalam analisis ini ialah overlay, dengan maksud menggabungkan beberapa peta untuk menghasilkan satu informasi yang menyeluruh. Dalam tahapan ini, peta kesesuaian lahan pertanian ditumpang tindihkan dengan peta Rencana Pola Ruang dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang bertujuan untuk mengetahui kawasan mana saja yang mengalami penyimpangan dalam peruntukan lahannya ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian, selanjutnya pembuatan Konsep Rekomendasi dari hasil overlay yang merujuk pada ketentuan dan kebijakan yang ada.

Hasil overlay kesesuaian lahan pertanian, dengan pola ruang dan KP2B menunjukkan bahwa, lahan yang sesuai dengan peruntukannya seluas 3.208,01 Ha, terdiri dari Kawasan tanaman setahun dan tahunan, yang peruntukannya sebagai Kawasan tanaman pangan (dalam Pola Ruang) dengan status lahan KP2B. Sedangkan lahan yang berstatus non KP2B seluas 2966,16 Ha, yang terdiri dari Kawasan tanaman pangan, Kawasan hutan lindung, Kawasan keunikan batuan dan fosil, Kawasan pariwisata, Kawasan perikanan budi daya, Kawasan perkebunan/rakyat, Kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, Kawasan peruntukan

industri, kawasan peruntukan pertambangan batuan, Kawasan peternakan, sempadan sungai dan Taman nasional.

Adapun lahan yang tidak sesuai peruntukannya seluas 74,88 Ha, dengan arahan tata ruang pertanian sebagai tanaman setahun dan tahunan yang terdiri dari Kawasan permukiman perdesaan, Kawasan permukiman perkotaan, Kawasan perikanan budi daya dan Kawasan pariwisata, yang masing masing berstatus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). untuk lebih detailnya ditunjukkan pada tabel berikut :



BOSOWA

Tabel 4.26 Matriks Pebandingan

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
1.	Tanaman Tahunan	Kawasan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	KP2B	6,15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada Kawasan ini, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 2. Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
			Non KP2B	130,34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian 2. Membatasi Pembangunan di Kawasan Pertanian yang berpotensi tinggi.
	Tanaman Setahun	Kawasan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	KP2B	39,51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memperbolehkan alih fungsi lahan sawah. 2. Alih Fungsi lahan sawah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
			Non KP2B	322,21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian alih fungsi Kawasan pertanian 2. Pembatasan KDB pada Kawasan daya dukung kemampuan lahan sedang dan rendah 3. Membatasi radius pengembangan Kawasan permukiman
2.	Tanaman Setahun	Kawasan Pertambangan Batuan	KP2B	-	Kawasan Pertambangan Tidak diperbolehkan di sekitar Kawasan pertanian yang berstatus KP2B
			Non KP2B	292,63	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pertambangan harus memiliki pengolahan limbah 2. Melakukan Kegiatan reklamasi pasca tambang berupa pemulihan lahan dan penghijauan 3. Pembatasan aktivitas tambang yang mengancam pencemaran lingkungan

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
3.					4. Pemberian persyaratan dokumen lingkungan hidup pemantauan dan dokumen lingkungan hidup.
	Tanaman Tahunan	Kawasan Pertambangan Batuan	KP2B	-	1. Peningkatan RTH dan penghijauan. 2. Penanaman vegetasi disekitar Kawasan industri pertambangan. 3. Meningkatkan vegetasi sekitar Kawasan pertambangan sebagai pengendalian pencemaran lingkungan
			Non KP2B	364,96	
	Tanaman Setahun	Kawasan Industri	KP2B	-	1. Peningkatan RTH dan penghijauan. 2. Penanaman vegetasi disekitar Kawasan industri 3. Pengendalian dan pengelolaan limbah yang mengancam pencemaran lingkungan
Non KP2B			24,36		
Tanaman Tahunan	Kawasan Industri	KP2B	-	1. Peningkatan RTH dan penghijauan.	
			Non KP2B	22,17	2. Penanaman vegetasi disekitar Kawasan industri.

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
					3. Pengendalian dan pengelolaan limbah yang mengancam pencemaran lingkungan.
4.	Tanaman Setahun	Kawasan Keunikan Batuan	KP2B	-	1. Tidak boleh melakukan alih fungsi lahan di kawasan Geo-Park . 2. Pembatasan aktifitas pertanian dan non pertanian yang mengancam dan merusak situs keunikan batuan. 3. Membatasi radius pengembangan kawasan pertanian dan non pertanian
			Non KP2B	4,33	
	Tanaman Tahunan	Kawasan Keunikan Batuan	KP2B	-	
			Non KP2B	2,62	

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
					3. Membatasi radius pengembangan kawasan pertanian dan non pertanian
5.	Tanaman Setahun	Kawasan Pariwisata	KP2B	0,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada Kawasan ini 2. Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
			Non KP2B	6,69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kawasan wisata agropolitan.. 2. Membatasi kegiatan wisata yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 3. Pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
	Tanaman Tahunan	Kawasan Pariwisata	KP2B	3,76	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada Kawasan ini

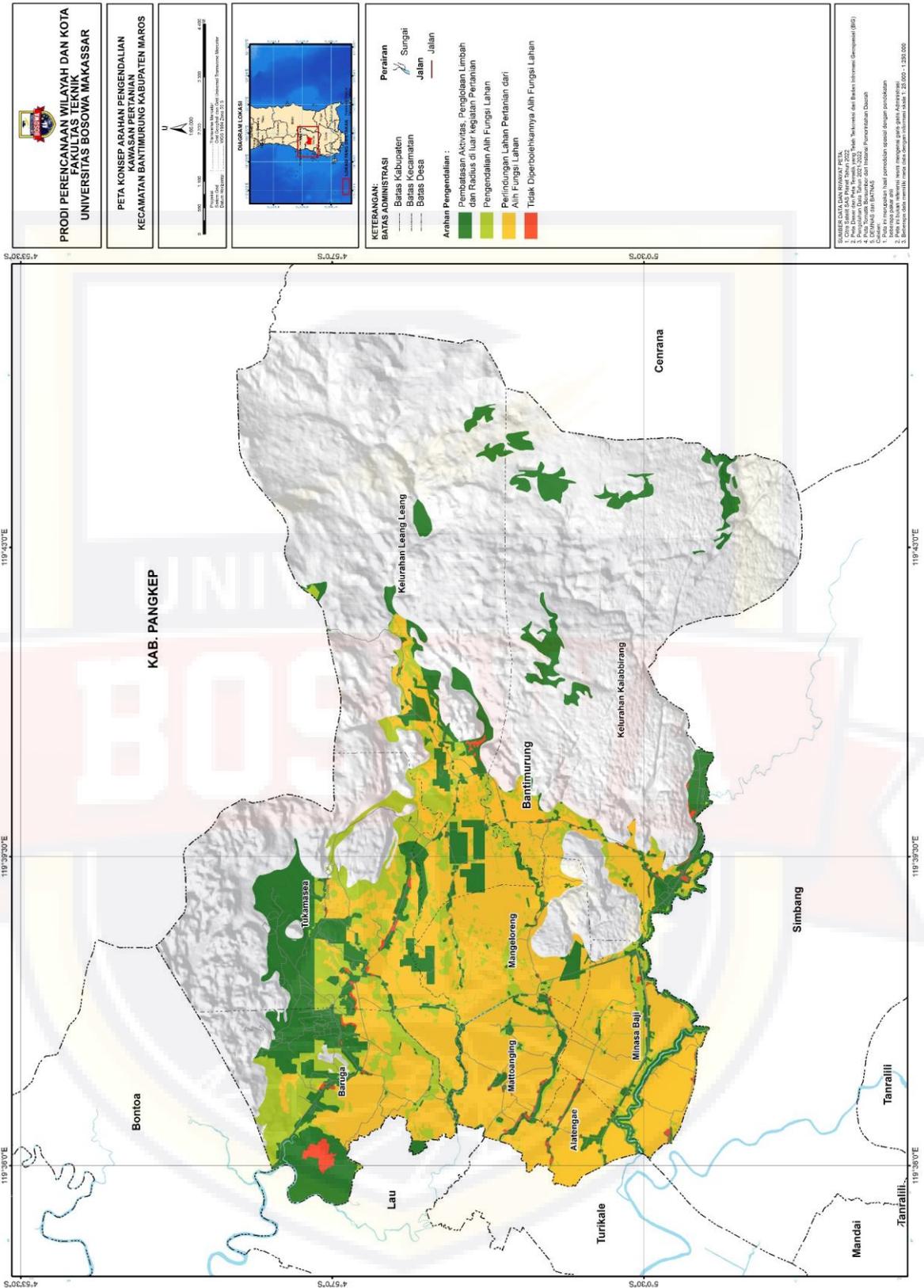
No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
					2. Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
			Non KP2B	20,42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kawasan wisata agropolitan.. 2. Membatasi kegiatan wisata yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 3. Pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). 4. Perencanaan infrastruktur persampahan
6.	Tanaman Setahun	Budidaya Perikanan	KP2B	24,48	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan sawah yang bersattus KP2B menjadi non sawah pada Kawasan ini 2. Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
					daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
			Non KP2B	144,08	Peningkatan RTH dan Penghijauan
7.	Tanaman Setahun	Kawasan Perkebunan/ Perkebunan Rakyat	KP2B	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan komoditi perkebunan rakyat 2. pengembangan Kawasan perkebunan melalui sistem dan usaha agribisnis dan pengembangan Kawasan industri masyarakat perkebunan
			Non KP2B	26,13	
	Tanaman Tahunan	Kawasan Perkebunan/ Perkebunan Rakyat	KP2B	-	
			Non KP2B	35,87	
8.	Tanaman Tahunan	Kawasan Peternakan	KP2B	-	Peningkatan RTH dan Penghijauan di sekitar Kawasan Peternakan
			Non KP2B	0,03	
9.			KP2B	3126,19	1. Rehabilitasi irigasi pada Kawasan KP2B

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
	Tanaman Setahun	Kawasan Tanaman Pangan			<ol style="list-style-type: none"> 2. Perlindungan Kawasan pertanian dari alih fungsi lahan 3. Meminimalisir alih fungsi lahan Kawasan pertanian yang berstatus KP2B dan mempertahankan lahan baku sawah serta
			Non KP2B	720,52	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan saluran irigasi 2. Meningkatkan teknologi di bidang pertanian
	Tanaman Tahunan	Kawasan Tanaman Pangan	KP2B	81,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi sesuai dengan UU No 41 tahun 2. Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros	KP2B	Luas (Ha)	Konsep Rekomendasi
					daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
			Non KP2B	239,49	1. Meningkatkan saluran irigasi 2. Meningkatkan teknologi di bidang pertanian
10.	Tanaman Setahun	Sempadan Sungai	KP2B	-	1. Penghijauan sempadan sungai 2. Pemeliharaan dan pembatasan aktivitas di sekitar sempadan
			Non KP2B	53,98	
	Tanaman Tahunan	Sempadan Sungai	KP2B	-	
			Non KP2B	34,77	
11.	Tanaman Setahun	Taman Nasional	KP2B	-	Pembatasan aktivitas di sekitar taman nasional
			Non KP2B	10,15	
	Tanaman Tahunan	Taman Nasional	KP2B	-	Pembatasan aktivitas di sekitar taman nasional
			Non KP2B	350,61	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2022



Gambar 4.27 Peta Konsep Arahan Pengendalian Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung terbagi menjadi dua kelas yaitu tanaman setahun dengan luas **4817,60 Ha**, dan tanaman tahunan **1457,77 Ha**.
2. Konsep pengendalian kesesuaian lahan pertanian tanaman setahun ataupun tanaman tahunan dengan peruntukan rencana pola ruang kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, kawasan pertambangan batuan, kawasan industri, kawasan keunikan fosil dan batuan, kawasan pariwisata, budidaya perikanan, dan tanaman nasional yang berstatus Non KP2B diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun untuk kesesuaian lahan pertanian dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status KP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada kawasan ini, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 dan untuk kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan diarahkan untuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, kebijakan rencana Tata Ruang Wilayah perlu di pertegas agar dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
2. Bagi masyarakat terkhusus pada petani memberikan penyuluhan tentang pentingnya lahan pertanian perlu untuk ditingkatkan untuk mempertahankan produktifiitas agar hasil produksi yang diperoleh semakin banyak, dan dapat meningkatkan pendapatan para petani, dan ikut menyukseskan program ketahanan pangan.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Maka pada penelitian selanjutnya disarankan untuk pengambilan data yang lebih akurat dan memperdalam kembali mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dan arahan pengendalian yang dapat diterapkan terhadap alih fungsi lahan kawasan pertanian .

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhy ir.,M.Sc, 1999, Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Ade Setiawan. 2010. Artikel Survey dan Evaluasi Lahan. <http://www.ilmutanah.unpad.ac.id/resources/artikel/survey-dan-evaluasi-lahan/>.
- Arsyad, Sitanala. 2006. Konservasi Tanah dan Air. Bandung: Penerbit IPB (IPB Press)
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kecamatan Bantimurung Dalam Angka Tahun 2021
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2022
- Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2022
- Barlowe, R. 1978. Land Resource Economics. Michigan State University, Printice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Brinkman, A.R. dan A.J Smyth. 1973. Land Evaluation for Rural Purposes. ILRI Publ. No. 17 Wageningen.
- Bungin & Burhan. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2009. Research Design (Pendekatan Kualitatif, dan mixed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Diwiryono, Ruslan. 1988. Strategi Pengembangan infrastruktur Perkotaan. Jakarta: bappena
- Eddy Prahasta. 2014. Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika). Informatika. Bandung.Indonseia.

Jayadinata, Johara T. 1992. Pembangunan Desa dalam Perencanaan. Bandung: ITB.

Kantaatmadja, M. K. (1994). Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang.

Lichfield D and Drabkin H. Darin, 1980, Land Policy and Urban Growth, Oxford, Pegamon Press

Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2007 tentang TEKNIK Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pontoh, K. Nia, Iwan Kustiawan.(2008). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*.Bandung:ITB

Rapoport, A. (1980). Cross-Cultural Aspects of Environmental Design. In I. Altman, A. Rapoport, & J. F. Wohlwill (Eds.), *Environment and Culture* (pp. 7-46). New York

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 2012-2032

Ritung, S., Wahyunto, F. Agus, H. Hidayat, 2007. EvaluasiKesesuaian Lahan, dengan Contoh Peta Arahana Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Center, Bogor.

Santun Sitorus. 1985. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung : Tarsito.

Saragih, R. 2015. Nugget Jamur Tiram (*Pleurotus Ostreatus*) sebagai Alternatif Pangan Sehat Vegetarian, E-Journal WIDYA Kesehatan dan Lingkungan. 1(2): 90-95.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

Sujarto, Djoko. 1992, Perkembangan Perencanaan Tata Ruang Kota di Indonesia. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, Bandung

Supratikno, SI, Armawi, A, Marwasta, D 2016, 'Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Mendukung Penyusunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pokok Wilayah (Studi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)', Jurnal Ketahanan Nasional, hlm. 22-41, vol. 22, no.1

Supriyadi A. 2004. Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan (Studikasu: Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Utomo, Sugeng Tri, dkk. 2009. PASTI (Preparedness Assesment Tools for Indonesia). Jakarta : HFI dan MCMC

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

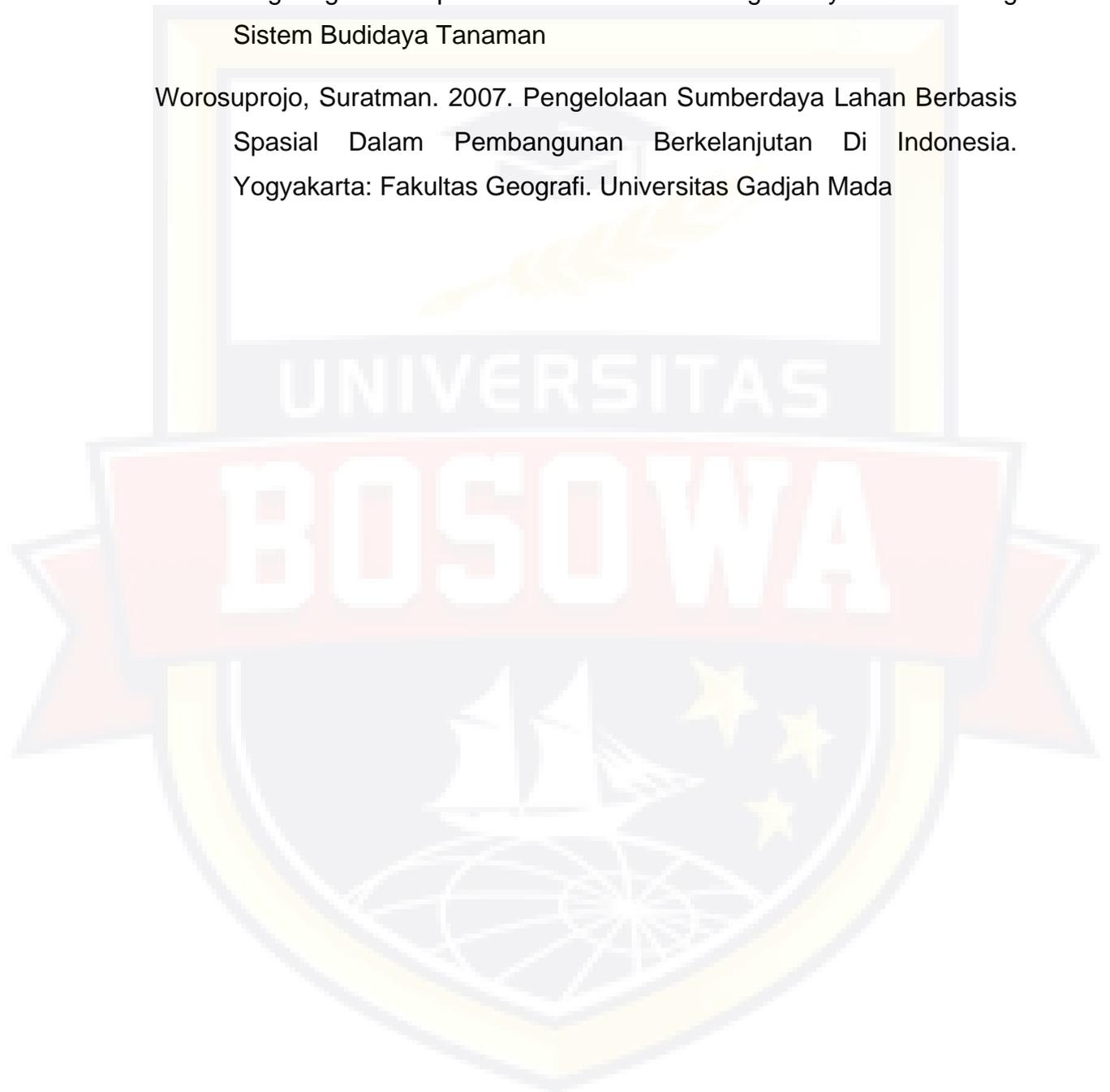
Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian

Undang-undang nomor 12 tahun 19 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah 92 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Worosuprojo, Suratman. 2007. Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN

- Visualisasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Putri Dwi Wulandary (Penulis) lahir di Ujung Pandang pada tanggal 04 juni 1999 dari ayah yang Bernama H.Haris,Ns.S.Kep,. M.Kes dan ibu bernama Hadra Habe. Penulis merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara. Penulis memasuki jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Dharmawanita Lisu pada tahun 2004 dan lulus di TK tersebut pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Pasar Baru pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tanete Riaja pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Barru pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, setelah lulus SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan disalah satu Perguruan Tinggi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Universitas Bosowa Makassar, Fakultas Teknik Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota.